



buletin **Kita**

KOMUNIKATIF, INFORMATIF, TERPERCAYA & AKURAT

Edisi 16/Tahun
IX/06/2020



2020



MENGERAKKAN SDM PENDIDIKAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19"



MENGERAKKAN KINERJA GURU PROFESIONAL MASA DARURAT PANDEMI COVID-19



Hubungi Kami



(0370) 631088



@lmpnusatenggarabarat



lmp.ntbkemdikbud.go.id



@lmpntb



Lpmp Nusa Tenggara Barat

SAMBUTAN KEPALA LPMP NTB

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita di beri kesempatan untuk terus berkarya dan berkreasi untuk kemajuan pendidikan di Republik Indonesia yang kita cintai ini khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Buletin "KITA" berharap dapat tampil semakin baik dan lebih bermakna di tahun ini, sehingga dapat menjadi salah satu media informasi dan komunikasi yang akan mengulas tentang dunia pendidikan pada saat ini terutama sebagai media yang akan merekam berbagai kegiatan yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, tetapi tidak menutup kemungkinan buletin "KITA" juga merekam berbagai aktifitas yang dilakukan dalam dunia pendidikan.

Semoga Buletin "KITA" dapat hadir dan memenuhi kebutuhan informasi pembaca, khususnya informasi dalam bidang pendidikan serta dapat memfasilitasi pendidik maupun tenaga pendidikan dalam menyalurkan aspirasi dan gagasan.

Kami berharap kehadiran buletin "KITA" ini dapat menjadi Rahmatan Lil Alamin bagi pembacanya.

Wassalam

Kepala LPMP NTB,
Mohamad Mustari, Ph.D
NIP. 196404111986031003



SALAM REDAKSI

Assalamualaikum Wr. Wb

Buletin "KITA" yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) memasuki edisi ke-16 dan telah hadir di hadapan pembaca. Di usia yang masih dini ini, telah banyak yang dihadirkan oleh Buletin "KITA" sebagai wadah sosialisasi, dan sharing informasi tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh LPMP NTB.

Pada edisi kali ini, kami mengangkat tema Menggerakkan SDM Pendidikan di Tengah Pandemi Covid 19. Tema ini di angkat terkait diberlakukannya tatanan baru "New Normal" akibat dari pandemi virus covid 19 secara global. Namun tuntutan akan berbagai informasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan LPMP NTB masih dapat tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh kalangan pendidikan.

Dengan nuansa baru edisi kali ini juga masih tetap menyajikan beberapa tulisan dari Widyaiswara, Guru, Struktural dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pendidikan dan menyangkut permasalahan dalam pembelajaran masa pandemi Covid 19 yang dituangkan dalam bentuk kajian, opini dan artikel terkait.

Akhirnya kami berharap dengan kehadiran Buletin "KITA" ini akan mampu menyalurkan aspirasi pembaca dalam dunia pendidikan. Semoga.

Wassalam

Redaktur,

Drs. Sakban.
NIP. 196512311994031012

daftar isi

SAMBUTAN KEPALA LPMP NTB	I
DAFTAR ISI	II
● LIPUTAN UTAMA	
– GELIAT LPMP NTB - Menggerakkan SDM Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid -19.	1
● KAJIAN	
1. Menggerakkan Kinerja Guru Profesional Masa Darurat Pandemi Covid-19	6
2. Meningkatkan Profesionalisme Guru Dan Mutu Proses Pembelajaran Pada Masa New Normal	10
3. Optimalisasi Peran Orang Tua Di Tengah Pandemi Covid 19	15
4. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Siapkan Generasi Tangguh	18
5. Strategi Penerapan Kegiatan Belajar Di Masa Pandemi Covid -19	22
6. Pendekatan Etnosains Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw Di Lombok Sebagai Penunjang Pembelajaran IPA SMP Kelas 7.	27
7. Memahami Hikmah Nuzul Qur'an Dalam Silaturahmi Fitriyyah Di Tengah Pandemi Covid-19	32
8. Pengertian, Tujuan Dan Manfaat Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) Calon Kepala Sekolah	35
● BERITA	
1. Kemitraan LPMP NTB Dengan Dinas DIKBUD PROVINSI NTB	39
2. Internalisasi ZI-WBK Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB.	41
3. LPMP NTB Selangkah Lebih Maju Dalam Mensukseskan Gerakan Zero Waste	43
4. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK pada LPMP NTB.	45
5. Kemitraan Dinas DIKBUD Kabupaten Sumbawa Dengan LPMP NTB	47
6. Evaluasi Program 2019 Dan Penyusunan Program Pembangunan ZI-WBK 2020	49
7. Jumat Bersih Percepat Derap Langkah LPMP NTB Menuju WBK	51
8. Melalui MCU Tingkatkan Pelayanan Publik Bermutu.	55
9. LPMP NTB Mengawal 4746 Sekolah Dalam Supervisi	57
10. Peran Satgas Pengendalian Gratifikasi Dalam Membangun ZI-WBK	58
11. LPMP NTB Laksanakan Pencanangan Pembangunan ZI-WBK	60
12. LPMP NTB Lakukan pendampingan pada 200 sekolah Model.	66
13. LPMP NTB Gelar Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru	68
14. Koordinasi Dan Konsolidasi Suatu Kecharusan Dalam PMP	70
15. Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik.	73
16. Covid-19, Monev Bdr Melalui Telekonferensi	74
17. LPMP NTB Laksanakan BIMTEK Pengelolaan BMN	77
18. Maksimalkan Layanan, ULT LPMP NTB Hadir Lebih Dekat Dengan Satuan Pendidikan.	79
19. Meningkatkan Mutu Pendidikan, LPMP NTB Laksanakan Mou Dengan Satuan Pendidikan.	80
20. Pandemi Covid-19, Pembelajaran Di Sekolah Terhenti?	82
● SERBA-SERBI	
1. Pusat Sanggar Rumah Belajar	84

dewan redaksi

- **Penanggung Jawab**
Mohamad Mustari, Ph.D
- **Pemimpin Redaksi**
Drs. Sakban
- **Redaktur**
Dra. Hj. Sri Sukriyani
Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd
- **Penyunting/Editor**
Rapiki, S.Pd
Rohady, SE
- **Fotografer**
Sahari Muri, S.Kom
Wahyu Ramdhani, S.Kom
- **Desain Grafis**
Imron Rosadi
Syamsul Hakim
- **Sekretariat/Distributor**
St. Agung Budiwidodo, A. Md
Husaini, S.Pd
Sarijan, S.Pd

Redaksi menerima kritik saran, tulisan baik artikel/opini atau kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan, dengan ketentuan artikel/opini maksimal 3 halaman, kajian hasil penelitian maksimal 5 halaman berupa Soft Copy dan Hard Copy, dengan dilampirkan pas foto ukuran 4 x 6. Tulisan yang masuk akan menjadi milik redaksi dan ditujukan ke alamat redaksi Buletin Kita, Jl. Panjtilar Negara No. 8 Mataram, Telpon 0370 631088 atau Email : rapikiaikmel2@gmail.com. Redaksi berhak mengedit, dengan tidak merubah substansi tulisan .

GELIAT LPMP NTB MENGGERAKKAN SDM PENDIDIKAN DI TENGAH PANDEMI COVID -19

Oleh : Anggraini Naskawati

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau biasa dikenal dengan istilah Corona Virus Diseases-19. Wabah ini dilaporkan teridentifikasi sekitar pertengahan bulan Desember di sebuah pasar makanan laut Huanan yang terletak di kota pusat kota Wuhan, Cina. Virus ini sangat mudah tertular melalui cairan yang dihasilkan dari bersin, batuk, dan berbicara. Cara penyebaran virus Corona juga bisa melalui kontak jarak dekat yang melibatkan sentuhan secara langsung seperti berjabat tangan. Selain itu, virus ini juga bisa menyebar jika seseorang bersentuhan dengan permukaan benda yang telah terpapar virus corona. Penyebab virus corona bisa menyebar ke seluruh dunia adalah karena penderita virus ini tampak dalam keadaan prima dan tidak memiliki gejala yang kemudian bisa menularkan ke orang disekitarnya. Akhirnya pada tanggal Badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum yaitu World Health Organization (WHO) menetapkan wabah virus covid-19 ini sebagai pandemi global.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tercemar oleh virus corona. Pemerintah telah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan harapan dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah Indonesia. Wabah yang diakibatkan virus ini membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat, khususnya pendidikan. Aktivitas belajar mengajar yang

biasa dilakukan secara langsung harus dihentikan dan digantikan dengan belajar secara daring.

Pada tanggal 24 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease. SE Tahun 2020 ini membahas tentang Ujian Nasional (UN), ketentuan proses belajar dari rumah, Ujian Sekolah (US), ketentuan kenaikan kelas, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan. SE Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan proses belajar dari rumah. Disebutkan bahwa belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.

Di era disrupsi yang semakin canggih ini, peserta didik dituntut agar memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi khususnya sebagai alat pembelajaran. Dengan belajar secara daring, hal ini memaksa dan mempercepat para peserta didik untuk dapat menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan

kebutuhan tersebut, membuat peserta didik dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Tidak hanya peserta didik, para guru juga dituntut agar memiliki kemampuan menggunakan teknologi. sudah jelas bahwa guru harus lebih pintar dan cerdas dibandingkan murid-muridnya, begitu pula dalam kemampuan menguasai teknologi. guru yang selama ini masih belum menguasai teknologi dipaksa harus lebih akrab dengan dunia teknologi dan komunikasi, karena jika guru tidak menguasai kemampuan ini akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang tidak maksimal. Selain itu, guru juga harus membuat situasi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Guru tidak harus melakukan ceramah kepada siswa karena pada kurikulum 2013 pembelajaran menggunakan pendekatan student center. Guru harus kreatif dengan berbagai inovasi, agar dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran di rumah. Guru juga harus mampu memberikan stimulus kepada murid-muridnya dengan berbagai pertanyaan kritis, sehingga merangsang siswa untuk mengembangkan pemikirannya dan aktif untuk terlibat dalam proses berpikir.

Guru harus dapat mengembangkan materi ajar dan memilih metode belajar yang sesuai dengan pembelajaran secara daring. Kemudian guru bisa melakukan evaluasi belajar dengan

murid-muridnya. Dalam proses belajar secara daring, komponen yang sangat penting dalam meningkatkan hasil pembelajaran adalah sumber pembelajaran yang digunakan baik oleh guru maupun peserta didik. Dengan memanfaatkan sumber belajar secara optimal, peserta didik akan dapat termotivasi untuk berpikir logis dan sistematis. Ada berbagai macam platform untuk menunjang pembelajaran secara online mulai dari video conference, kolom diskusi online, dan streaming video pembelajaran. Kemampuan guru inilah yang merupakan PR besar bagi LPMP Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyikapi pandemi Covid-19, ada tiga zona sikap masyarakat, antara lain; zona takut (fear zone), zona belajar (learning zone), dan zona berkembang (growing zone). Saat awal-awal pandemi ini masuk ke Indonesia, banyak masyarakat yang takut dan khawatir (fear zone). Dampaknya, panic buying masker, hand sanitizer, dan kebutuhan pokok terjadi di banyak tempat. Akibatnya, persediaan barang-barang tersebut menjadi langka, dan kalau pun ada harganya sangat mahal, karena muncul praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini juga diperparah oleh banyaknya hoaks yang beredar melalui grup-grup WA, sehingga masyarakat yang sudah panik, menjadi semakin panik. Satu bulanan selama pandemi, walau masih banyak warga masyarakat yang belum sadar terhadap bahaya pandemi ini yang ditandai dengan semakin banyak orang yang positif Covid-19, tetapi sudah banyak juga masyarakat yang masuk ke zona belajar (learning zone) dimana

mereka mulai mau belajar dalam menghadapi pandemi ini. Antara lain, diam di rumah, keluar rumah kalau ada kepentingan yang mendesak, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, rajin cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan melakukan hal-hal yang positif saat diam di rumah.

Bulan kedua dan bulan ketiga masyarakat sudah masuk ke zona berkembang (growing zone) yang ditandai dengan meningkatnya solidaritas dan gotong royong, menggalang bantuan untuk sesama yang membutuhkan, karena tidak dapat dipungkiri banyak yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini.



Kemudian tetap bersyukur, berpikir positif, tetap berikhtiar, dan tetap berbahagia agar kondisi iman dan imun tubuh tetap terjaga atau aman.

LPMP Nusa Tenggara Barat juga telah melakukan aksi solidaritas dan gotong royong serta menggalakkan bantuan untuk sesama yang membutuhkan yaitu pelaksanaan pembagian masker dan sembako.

Banyak hal yang telah dilakukan LPMP Nusa Tenggara Barat dalam menggerakkan SDM pendidik di tengah pandemi Covid-19. Walau demikian, era pandemi ini memang menjadi tantangan bagi kepala sekolah dan guru untuk kreatif mengelola pembelajaran,

khususnya bagi para siswa baru yang biasanya mendapatkan sentuhan guru-gurunya di sekolah yang baru. Kepala sekolah harus siap dengan berbagai alternatif PJJ yang digunakan, baik daring, luring, ataupun kombinasi daring dan luring. Guru perlu menyiapkan skenario pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Selain ada materi yang mengacu kepada kurikulum 2013 atau kurikulum new normal, juga bisa meramu materi yang berorientasi kepada kecakapan hidup (life skill) dan penguatan Pendidikan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam praktiknya, PJJ dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan

sarana dan prasarana (HP/laptop), sinyal internet yang tidak stabil, hingga beban biaya kuota internet yang harus dibeli oleh orang tua siswa. Menyikapi hal tersebut, Kemendikbud menyiasatinya dengan meminta agar para penyedia layanan seluler menyediakan paket-paket murah untuk mengakses

sumber belajar secara daring memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk membeli kuota internet untuk guru dan siswa dari dana BOS, bekerjasama dengan RRI dan TVRI dalam menyampaikan materi pelajaran untuk para peserta didik mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Selain itu, di daerah yang peserta didiknya tidak memiliki HP/laptop dan tidak terjangkau oleh siaran radio atau TV, ada guru yang datang ke rumah siswa untuk membimbing kegiatan belajarnya. Hal tersebut menunjukkan sebuah kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi dari seorang guru dalam melaksanakan tugasnya.



Walau dalam kondisi masih ada pandemi Covid-19 yang saat ini disebut sebagai New Normal, penjaminan mutu di satuan pendidikan tetap harus dilakukan walau tentunya tetap menyesuaikan kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad pernah menyampaikan bahwa tahun pelajaran 2020-2021 tetap dilaksanakan Minggu ke-3 Juli 2020 dengan menggunakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sampai akhir 2020. Teknis pembelajaran bisa dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring), atau kombinasi (blended) daring dan luring. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Sekolah rencananya kembali dibuka pada Januari 2021. LPMP Nusa Tenggara Barat juga telah melakukan berbagai upaya dalam menggerakkan Sumber Daya Manusia Pendidikan di tengah pandemi Covid 19 ini, diantaranya dengan kegiatan penyusunan program masa pandemi dalam mendukung produktivitas kerja serta untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai serta masyarakat dalam tatanan normal baru dan merujuk Surat Edaran

Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian dinternalisasikan dalam penyesuaian system kerja, penilaian kinerja, pemantauan dan pengawasan, disiplin kerja dan dukungan infrastruktur.

Untuk pendidik dan tenaga kependidikan LPMP Nusa Tenggara Barat, melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui Daring antara lain : Analisis Data Mutu melalui Daring, Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu melalui Daring, Diseminasi Pemetaan Mutu melalui daring, Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Daring, Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan

melalui Daring, Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas melalui Daring, Supervisi ke Satuan Pendidikan melalui Daring, Analisis Supervisi Mutu Pendidikan melalui Daring, Diseminasi Supervisi Mutu melalui Daring, Sosialisasi SPMPDM kepada sekolah binaan melalui Daring, Penyusunan Program Kerja sekolah binaan melalui Daring, Pendampingan Sekolah yang difasilitasi LPMP melalui Daring, Penyusunan Program Kerja SPME Pemda melalui Daring, Diseminasi Hasil SPME melalui Daring, Monitoring Kebijakan Kemdikbud melalui Daring, Sosialisasi SPMPDM kepada Pemda melalui Daring, Bimtek Operator Dapodik dan Pengawas Sekolah melalui Daring, Pelaksanaan Pengumpulan Data melalui Daring, dan Verifikasi dan Validasi Data melalui Daring.

Semoga apapun yang telah dan akan dilaksanakan oleh LPMP Nusa Tenggara Barat dapat dapat meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat, walaupun dalam kondisi pandemi covid-19.

Sumber Bacaan :

<https://kompas.com/new-normal-pendidikan-yang-berorientasi-pada-siswa>

<https://republika.co.id/skenario-pendidika-masa-new-normal>



MENGGERAKKAN KINERJA GURU PROFESIONAL MASA DARURAT PANDEMI COVID-19



Dr. Syamsul Hadi, M. Pd.
Widyaiswara Ahli Madya
LPMP NTB
s.hadi26@yahoo.com

Kinerja guru benar-benar diuji di masa darurat pandemi *covid-19*, sebab tidak sedikit guru masih gamang dalam menyikapinya, dan berdampak kepada kualitas kinerja guru pada masa darurat pandemi *covid-19*. Kinerja merupakan *performance* atau unjuk kerja yang diperlihatkan guru dalam wujud kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran. Kegamangan guru dalam menyikapi kondisi yang tidak terduga sebelumnya membuat kinerja tidak terkontrol, tidak terukur, dan tidak akuntabel.

Standar kinerja guru terlihat dari *quality of works, promthness, initiative, and communication* (T.R. Mitchell: 1989). Kualitas pekerjaan (*quality of work*) merupakan suatu hasil pekerjaan yang terukur baik efisiensi maupun efektifitasnya. Kualitas kinerja guru profesional akan menggambarkan paa efisiensi

dan efektifitas pengelolaan pembelajaran masa darurat pandemi *covid-19*. Kejujuran (*promthness*) akan membangun kepercayaan, dan kepercayaan merupakan *value* yang utama dari suatu proses. Kejujuran yang mewujudkan kepercayaan menjadi kunci dari gerakan bersama dalam mewujudkan guru profesional. Prakarsa (*initiative*) merupakan ide atau gagasan yang diperlihatkan seseorang sebagai wujud kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan.

Prakarsa dalam mengelola pembelajaran masa darurat pandemi *covid-19* merupakan bukti nyata dari kemampuan kinerja (*performance*) guru profesional. Komunikasi (*communication*) merupakan penyampaian pesan, ide, gagasanyang diperlihatkan seseorang. Kualitas komunikasi akan terlihat jelas dari pesan, ide, gagasan yang disampaikannya. Demikian halnya bahwa komunikasi yang diperlihatkan guru dalam pembelajarannya pada masa darurat pandemicovid-19 dapat dijadikan kualitas kinerja (*performance*) guru profesional.

INDIKATOR KINERJA GURU PROFESIONAL MASA PANDEMI COVID-19

pembelajaran/*teaching plans and material*, (2) melaksanakan proses pembelajaran/ *classroom action*, (3) kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran/ *asesment learning*, (Rusman:2011).

Indikator kinerja (*performance*) dalam situasi normal tidak sama dengan indikator *performance* masa darurat pandemi *covid-19*. Indikator *performance* pada masa darurat pandemi *covid-19* terjabarkan sebagai rumusan kontekstualisasi sesuai dengan panduan pembelajaran masa darurat penyebaran *covid-19*. Dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang panduan pembelajaran masa darurat penyebaran *covid-19*, "bahwa pembelajaran dilakukan dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh secara daring/*online* danluring/ *offline*". Pembelajaran jarak jauh dalam Jaringan/*online* (daring), menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Pembelajaran jarak jauh Luar Jaringan/*offline* (luring), menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja,



bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka indikator kinerja guru profesional masa darurat pandemi covid-19 terbagi menjadi 2 yaitu indikator kinerja pelaksanaan pembelajaran secara daring/*online*, dan indikator kinerja pelaksanaan pembelajaran secara luring/*offline*.

Indikator kinerja (*performance*) guru profesional dengan pendekatan daring/*online* pada 3 komponen utama; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dijabarkan yaitu; (1) komponen perencanaan meliputi indikator kinerja (*performance*) yaitu; (a) penentuan karakteristik peserta didik, memastikan dimilikinya akses untuk mengikuti kegiatan *online* terkait dengan ketersediaan jaringan, perangkat *online* (smartphone, laptop/komputer, *gadget*), (Masykuri: 2020). (b) Perumusan tujuan, menjadi bagian yang sangat penting untuk dirumuskan. Pembelajaran daring/*online* juga memiliki keterbatasan, sehingga tidak dapat digunakan untuk dampak pembelajaran yang holistik. Misalnya orientasi pengembangan karakter tidak mudah dilakukan melalui kegiatan *online*, karena pemberdayaan karakter membutuhkan habituasi (pembiasaan) yang dicontohkan langsung oleh guru. Dalam habituasi memerlukan kinteraksi humanisme melalui verbal dan non verbal.

Demikian juga halnya dengan aspek keterampilan yang membutuhkan praktik secara langsung. Karena itu merumuskan hasil belajar yang integratif dengan kegiatan *online* menjadi unsur yang sangat penting, (c) identifikasi materi, mutlak diwujudkan dalam suatu rangkaian pembelajaran *online*. Materi dalam pembelajaran *online* sederhana, singkat dan jelas karena proses pembelajaran yang terjadi umumnya satu arah. (d) penentuan program *webbase*, merupakan langkah yang penting agar tetap sasaran, tepat guna, dan tepat mutu. Alternatif

webbase learning yang mungkin digunakan seperti; *Social Learning Network, Website dan atau blog, Learning Management System (LMS), Video Conference, Video streaming portal*. Penentuan program *webbase* mempertimbangkan karakteristik peserta didik, tujuan, materi, dan evaluasi yang akan dilakukan, dan (e) perancangan evaluasi sebagai alat kontrol dan pengembangan kegiatan daring/*online*.

(2) komponen pelaksanaan diperlihatkan oleh indikator kinerja (*performance*) yaitu; kemampuan penggunaan program *webbase* yang digunakan, penguasaan materi, motivasi, respon peserta didik, efektifitas dan efisiensi keterlaksanaan, (3) komponen evaluasi diperlihatkan oleh indikator kinerja (*performance*) yaitu; alat evaluasi, konten evaluasi, hasil evaluasi, retensi evaluasi

Indikator kinerja (*performance*) guru profesional dengan pendekatan luring/*offline* pada 3 komponen utama; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dijabarkan yaitu; (1) komponen perencanaan diperlihatkan oleh indikator kinerja (*performance*) yaitu; merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun bahan/ materi ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, merumuskan strategi/ metode pembelajaran, dan merencanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan tujuan (2) komponen pelaksanaan diperlihatkan oleh indikator kinerja (*performance*) yaitu; Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran diukkan dengan indikator; kemampuan membuka pembelajaran, *attitude* dalam

proses, penguasaan bahan/materi, kemampuan memproses strategi/metode, kemampuan menggunakan media, kemampuan melakukan evaluasi, kemampuan menutup pembelajaran, dan mengelola tindak lanjut



pembelajaran. (3) komponen perencanaan diperlihatkan oleh indikator kinerja (*performance*) yaitu; Kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran yang diperlihatkan dengan indikator; membut alat evaluasi sesuai dengan tujuan, mengolah hasil evaluasi, dan membuat keputusan hasil evaluasi dan membuat program tindak lanjut dari hasil evaluasi..

MENGERAKKAN KINERJA GURU PROFESIONAL MASA PANDEMI COVID-19

Mengerakkan memiliki kosa kata dasar "Gerak". Dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti "perpindahan tempat", Mengerakkan berarti membangkitkan dan mendorong suatu aktivitas secara terus-menerus. Berdasarkan makna dalam bahasa maka dapat dijelaskan bahwa mengerakkan kinerja guru profesional masa darurat pandemi covid-19 adalah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk membangkitkan, memberikan motivasi atau mendorong kinerja guru profesional secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga dapat melakukan adaptasi dengan berbagai kondisi (masa daa

pandemi *covid-19*) untuk keberlangsungan pembelajaran. Kinerja (*performance*) guru profesional dalam kondisi tertentu (masa darurat pandemi *covid-19*) tidak mudah segera diberdayakan, karena memerlukan adaptasi, perencanaan, dan orientasi. Dengan demikian membangkitkan kinerja (*performance*) guru profesional masa pandemi *covid-19* perlu di wujudkan melalui suatu proses dengan tahapan yang berkesinambungan pada setiap tahapan. Menggerakkan kinerja guru profesional masa pandemi *covid-19* dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) penyiapan pengetahuan dan keterampilan, (2) pemberian motivasi, (3) pembiasaan, (4) pengembangan, (5) pembelajaran, (6) tindak lanjut.

Tahapan pertama “penyiapan pengetahuan dan keterampilan”. Pikiran utama pada tahapan pertama yaitu tidak akan terjadi motivasi seseorang jika tidak memahami apa yang akan dilakukan. Pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran pada masa darurat pandemi *covid-19* baik secara *daring/online* maupun *luring/offline* senantiasa harus dimiliki oleh para guru, sehingga merangsang motivasi. Tahapan kedua “pemberian motivasi”.

Motivasi selalu diinspirasi oleh adanya stimulus baik secara *instrinsik* maupun *ekstrinsik*. Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pembelajaran masa darurat pandemi *covid-19* merupakan rangsangan *instrinsik*, sedangkan motivasi yang diberikan dari pemangku kepentingan seperti; Dinas Pendidikan, LPMP, masyarakat merupakan motivasi *ekstrinsik*. Karena itu keterlibatan semua untuk memberikan dukungan materi maupun non materi sebagai suatu gerakan bersama perlu dilakukan. Tahapan ketiga “pembiasaan” senantiasa secara terus menerus dilakukan. Kemampuan melaksanakan pembelajaran masa darurat pandemi *covid-19* sangat ditentukan oleh kegiatan yang terus menerus atau pembiasaan yang dilakukan. Pembiasaan melakukan pembelajaran masa darurat pandemi *covid-19* akan meningkatkan keterampilan dan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru.

Agar kualitas pembelajaran masa darurat pandemi *covid-19* dapat terwujud maka seyogyanya guru terus-menerus melakukan upaya pembelajaran secara konsekwen. Tahapan ke-empat “pengembangan” yaitu merespon pembiasaan yang dilakukan. Pengembangan merupakan aktivitas lanjutan dari pembiasaan. Wujud dari aktivitas pengembangan yaitu guru

profesional harus memiliki perangkat pendukung aktivitas pembelajaran masa darurat pandemi *covid-19*. Perangkat dalam bentuk kelengkapan administrasi seperti, RPP, bahan ajar, media, lembar kerja siswa, dan penilaian harus dimiliki oleh guru. Tahapan ke-lima “Pembelajaran” yaitu guru memiliki tagihan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Tagihan dalam bentuk laporan progress kegiatan yang dialami dalam bentuk keberhasilan, kekurangan, dan langkah antisipasi agar senantiasa terjadi perbaikan. Tahapan keenam “tindak lanjut” merupakan langkah perbaikan yang dilakukan selanjutnya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya.

Tahapan kegiatan berkesinambungan tersebut, jika yang dilakukan oleh guru maka dapat dikatakan sebagai jaminan profesionalisme dalam melaksanakan pembelajaran masa darurat pandemi *covid-19*. Demikian halnya, keterlibatan semua pihak turut mengembangkan dan mendorong sebagai wujud keikutsertaan menggerakkan profesionalisme guru masa darurat pandemi *covid-19* sangat diperlukan. Pengambilan peran pemangku kepentingan (masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan pemerintah) merupakan keharusan dalam mewujudkan profesionalisme guru masa darurat pandemi *covid-19*.

PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2020. Surat Edaran tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 19*. Sekertaris Jenderal Kemdikbud: Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2020. Surat Edaran nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan pada masa darurat *Covid-19*. Sekertaris Jenderal Kemdikbud: Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2020. Surat Edaran nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sekertaris Jenderal Kemdikbud: Jakarta.
- Masykuri, Mohammad, 2020. Pemanfaatan simulasi virtual dan isu *Covid-19* dalam pembelajaran sains (permasalahan & solusi). Tidak diterbitkan. Makalah seminar nasional *online* pembelajaran IPA masa pandemi *covid-19*.
- Menteri Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sekerretaris Menteri Pendidikan Nasional, Jakarta
- Mitchell, T.R. 1989. *People in organisation: An Introduction to Organizational Behavior*. New York: McGraw Hill Book.
- Rusman, 2011. Model-model Pembelajaran yang mengembangkan profesionalisme guru. Jakarta. Rajawali Press.

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN PADA MASA NEW NORMAL

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, sebagai awal dimulainya masa *new normal* (kenormalan baru), ditanggapi beragam oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali pada bidang pendidikan, tetapi hanya dunia pendidikan yang belum mengeluarkan aturan serupa. Hal ini perlu dipikirkan lebih mendalam mengingat pendidikan memiliki taruhan jangka panjang, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan sumberdaya manusia dan masa depan Indonesia sendiri. Jika tanpa pencermatan dan kesungguhan rencana yang tepat atas dampak covid-19, maka berkemungkinan besar generasi terdidik bangsa ini menjadi korban dan klaster penularan covid-19 yang sangat massif, sehingga kebijakan ini perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan kebijakan *new normal* dan dampaknya terhadap kelangsungan pendidikan.

New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario *new normal* dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. "Badan bahasa sudah memberikan istilah Indonesianya yaitu Kenormalan Baru. Kata Normal sebetulnya dalam bahasa Inggris sudah dijadikan nomina makanya jadi *New Normal*. Badan bahasa kemudian membuat



**Anggraini Naskawati, M.Pd
Widyaiswara Ahli Madya
LPMP NTB**

padanannya menjadi Kenormalan. Karena kalau normal itu adjektiva kata sifat, jadi Kenormalan Baru," kata ahli bahasa Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat dari Universitas Indonesia. (Detik.com, 30/05/2020). Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. (Kompas, 16/05/2020)

Perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran di masa *new normal* adalah tetap berorientasi pada kebutuhan anak, dalam artian para peserta didik mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, kontekstual, tidak diberikan beban belajar atau tugas yang berlebihan agar mereka tidak stress demi menjaga kesehatan (fisik dan psikis) dan menjaga daya tahan (imunitas) tubuh mereka. Hal ini pun sebenarnya telah ditegaskan oleh Kemdikbud agar pembelajaran tidak harus terfokus kepada pencapaian seluruh target kompetensi, tetapi membangun kecakapan hidup (*life skill*) dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) skenario besar tentang kebijakan pendidikan di masa *new normal* ini.

Pertama, skenario optimistis, menyatakan bahwa peserta didik kembali ke sekolah/kampus dan proses pembelajaran untuk tahun akademik 2020/2021 dimulai kenario ini, semua layanan pendidikan dibuka, proses pembelajaran dan pertemuan tatap mukapun dilakukan, sebagaimana layaknya masa sebelum adanya wabah Covid-19. Skenario optimistis ini cenderung didasarkan atas kenyataan telah lamanya peserta didik berada di rumah, yang sebagian di antara mereka dan orang tuapun telah mengalami kejenuhan yang akut. Akibat lamanya anak di rumah, perkembangan akademik anaknya semakin terbelakang. Bahkan, terdengar kasus, ada orang tua yang "mengancam" kalau sekolah tempat belajar anaknya itu tidak segera dibuka, maka ia akan pindah ke sekolah lain.

Kedua, skenario pesimistis, yakni layanan dan proses pendidikan untuk tahun akademik baru diundur hingga, sekurang-kurangnya, bulan Desember 2020. Artinya, terdapat penambahan waktu dalam 1 (satu) semester ke depan peserta didik tetap berada di rumah, dan tidak ada layanan pendidikan, sehingga untuk awal tahun akademik digeser, semula Juli-Juni menjadi Januari-Desember. Skenario ini didasarkan atas pertimbangan untuk memastikan tidak adanya korban covid-19 dari lingkungan

pendidikan. pada bulan Juli 2020. Dalam

Ketiga, skenario moderat, yakni tahun akademik tetap dimulai bulan Juli 2020, tetapi dengan pendekatan dan mekanisme proses pendidikan yang perlu diatur lebih lanjut. Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) pendekatan: pertama, pendekatan 100% daring (dalam jaringan), yakni seluruh rangkaian proses pembelajaran seutuhnya dilakukan secara online; dan kedua, pendekatan blended learning, yakni menggabungkan pendekatan daring dan luring (luarjaringan).

Melihat ketiga skenario yang dijabarkan tersebut, kiranya skenario ketiga yang paling memungkinkan untuk dilakukan yaitu dengan pendekatan blended learning, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, cenderung dapat dijadikan alternatif strategis. Jika dilakukan dengan pendekatan 100% daring, maka proses pendidikannya sangat potensial tidak akan efektif. Sebab, hingga saat ini, infrastruktur jaringan, kemampuan sumber daya manusia, dan kesiapan pembiayaan pada seluruh stakeholder pendidikan agaknya belum memungkinkan.

Pada sejumlah daerah tertentu kondisi signal telekomunikasi masih belum bisa diakses; pendidik dan peserta didik belum semuanya memiliki kesiapan atas penggunaan media komunikasi dengan baik; dan tentunya beban finansial akan semakin besar. Eksperimentasi dalam beberapa bulan terakhir, dengan sebagian pendidik dan peserta didik telah memulai proses pembelajarannya secara masif secara virtual, patut untuk dijadikan pengalaman berharga dalam pelaksanaan *blended Learning*. Pendekatan *blended learning* pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka (luring) dan secara virtual (daring). Ia akan menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran,

dan gaya pembelajaran, dengan berbagai pilihan media dialog antara pendidik dengan peserta didik, baik secara langsung (*face-to-face*) maupun secara daring. Menggabungkan kelebihan-kelebihan pada kedua cara tersebut dalam sebuah proses pembelajaran yang efektif merupakan ciri dari *blended learning*. *Blended learning* ini akan memberikan keuntungan, di antaranya fleksibilitas dalam memilih waktu, tempat untuk mengakses pelajaran, dan pemilihan materi-materi yang tepat, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kapasitas lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Selain pengkajian diatas, pemerintah pada saat ini juga tengah mengkaji aturan kenormalan baru atau new normal di sektor pendidikan. Salah satu opsi yang muncul adalah aturan tentang hanya sekolah dan perguruan tinggi di daerah dengan status hijau yang boleh menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka. Itupun tetap dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode blended learning ini maka tidak bisa lepas dari keberadaan guru dalam proses dan pendidikannya yang diharapkan lebih bermutu dan jika kita berbicara tentang mutu proses pada khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya maka fikiran kita akan tertuju pada profesi seorang guru, karena pada dasarnya guru sebagai ujung tombak proses pendidikan. Sebagai ujung tombak kualitas guru akan sangat menentukan kualitas mutu layanan dan lulusan yang dihasilkan, namun selama ini guru tidak akan sanggup dan tidak akan mampu sendirian menghadapi pengaruh globalisasi yang semakin dahsat. Untuk menjaga kualitas pendidikan yang diselenggarakan komponen guru merupakan salah satu konsentrasi manajemen pendidikan. Dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan dosen dalam



melaks

anakan tugakeprofesionalannya meliputi 4 hal, yaitu : 1) Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berahlak mulia, 2) Kompetensi pedagogik sebagai kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kemampuan yang dimilikinya, 3) Kompetensi profesional Merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya, 4) Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar(. Makawimbang : 2013 : 54).

Kajian Utama

Selain empat kompetensi yang dipaparkan diatas, juga seorang guru harus memiliki sepuluh kemampuan dasar : yaitu 1) menguasai landasan landasan pendidikan; 2) menguasai bahan pelajaran; 3) kemampuan mengelola program belajar mengajar; 4)

5) kemampuan mengelola kelas; 6) kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar;

7) menilai hasil belajar siswa; 8) kemampuan mengenal dan menerjemahkan kurikulum; 9) mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan; 10) memahami prinsip prinsip dan hasil pengajaran dan; 11) mengenal dan

menyelenggarakan administrasi pendidikan. Jadi seorang guru dapat dikatakan mempunyai kematangan secara profesional apabila sudah memenuhi unsur yang disebutkan diatas. Kematangan profesional guru harus menjadi perhatian secara global karena guru tugas dan perannya bukan hanya memberikan informasi informasi ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan di era kompetitif sekarang ini. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek intelektual, sosial, emosional dan keterampilan . Tugas mulia ini menjadi sangat berat, bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis baik sebagai individu maupun profesional. (Makawimbang, 2013:56)

Kematangan profesionalisme harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Usaha untuk

meningkatkan kematangan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab bersama LPTK sebagai pencetak guru, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau Yayasan swasta), PGRI, masyarakat dan guru itu sendiri harus memiliki keinginan yang kuat untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Pada paparan diatas sudah dijelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana seorang guru baru dikatakan memiliki



kematangan profesionalisme , sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana profesionalisme guru ini dapat meningkatkan mutu proses pada khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. Bila kita berbicara mutu proses yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara umum

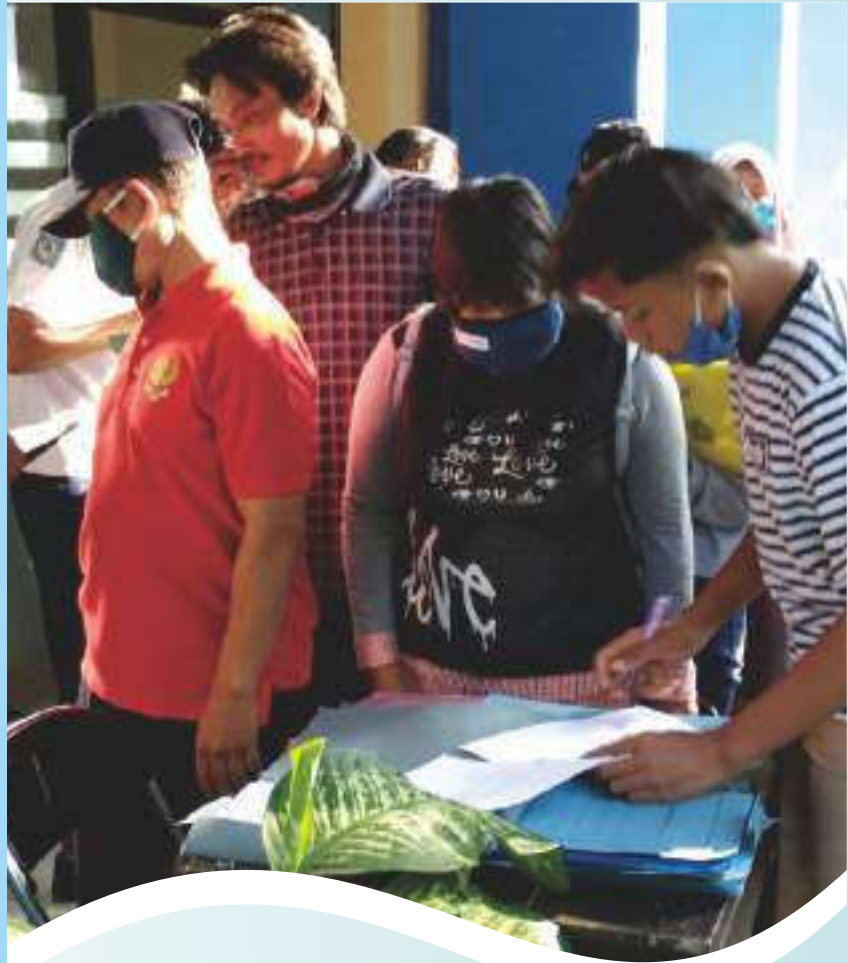
Tujuan belajar bagi peserta didik yang utama adalah bahwa apa yang dipelajarinya Berguna dikemudian hari. Kaitan antar apa yang diinginkan pendidik untuk dipelajari peserta didik dan pembelajaran yang sesungguhnya

disebut pengajaran atau pedagogi. Pengajaran yang efektif menurut Slavin sebagaimana dikutip Sagala, bukanlah masalah sederhana ketika seseorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih banyak memindahkan pengetahuan itu kepada orang lain. Apabila telah mampu menceritakan berarti mengajar. (Slavin : 2008) Menegaskan bahwa pengajaran yang efektif menuntut penggunaan banyak strategi. Kemudian strategi belajar, dimaksudkan membantu pendidik dan peserta didik untuk belajar terus dengan cara yang lebih mudah. Guru yang efektif bukan hanya mengetahui pokok permasalahan, tetapi dapat juga mengkomunikasikan pengetahuan mereka kepada peserta didik. Secara umum istilah mengajar antara lain 1) mengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan dari seseorang kepada kelompok; 2) mengajar adalah membimbing peserta didik untuk belajar; 3) mengajar adalah mengatur lingkungan agar terjadi proses belajar mengajar. Sedangkan strategi menurut Kozna (1989) adalah setiap kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Untuk membahas strategi pembelajaran pada kesempatan ini pokok pembahasannya adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (paikem) dan dalam masa New Normal ini diharapkan guru juga mampu menyampaikan pembelajaran dengan pendekatan ini dengan menggunakan teknik blended learning. Paikem berarti guru menggunakan teknik pembelajaran terpadu menggunakan strategi, metode pendekatan dan teknik

pengajaran baik prosedur maupun tujuan pembelajaran. Implementasi paikem dalam praktik pembelajaran sangat penting untuk sekolah untuk menggali informasi, khusus contoh contoh perkembangan yang langsung dari lapangan.

Dalam pembelajaran menggunakan tehnik Blended learning ini setidaknya dapat menerapkan empat program utama menurut Muji dan Reynolds yang terkait dengan keterampilan berfikir yaitu : 1) mengajarkan sejumlah keterampilan mengatasi masalah (*problem solving*) kepada peserta didik; 2) pendekatan metakognitif mulai dari premis bahwa kinerja seseorang dapat ditingkatkan melalui pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang proses berfikirnya sendiri ; 3) Sebagai pendidik percaya bahwa pembelajaran *open ended* dan aktif, yang didorong oleh metode belajar yang konstruktivis, Sudah cukup untuk mengembangkan keterampilan belajar tingkat tinggi peserta didik dan ; 4) pendekatan berfikir formal membantu peserta didik menjalani transisi antar tahap perkembangan dengan lebih mudah. Model dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran dengan menggunakan fasilitas dan media pembelajaran yang tepat intinya adalah kadar tingginya kegiatan belajar banyak dipengaruhi oleh pendekatan dan model belajar mengajar yang digunakan guru apakah sudah sesuai atau belum (Saiful Sagala : 2012 :57-58)

Dari paparan diatas betapa profesionalisme seorang guru sangat menentukan meningkatnya mutu proses, tentu dengan menguasai dan menggunakan berbagai teknik, metode, pendekatan, dan model yang tepat agar dapat membangkitkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar.



DAFTAR BACAAN :

Muijis, Daniel dan Reynolds, David, 2008, *Effective Teaching : Teori dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
<https://www.merdeka.com/membedah-tantangan-dunia-pendidikan>
<https://www.kompas.com/new-normal-pendidikan-yang-berorientasi-pada-siswa>
<https://www.republika.com/skenario-pendidikan-pada-masa-new-normal>

OPTIMALISASI PERAN ORANG TUA DI TENGAH PANDEMI COVID 19



Oleh
Bakhtiar Ardiansyah, S.Pd, M.Pd
Widyaiswara Madya LPMP NTB

Pandemi covid-19 telah menciptakan kebutuhan dan perlunya menjaga jarak dalam **interaksi sosial (social distancing)**, **karantina**, dan **isolasi** sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Sejak pandemi covid-19 terjadi di Indonesia, penerapan belajar dari rumah diterapkan oleh semua satuan pendidikan. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menyatakan bahwa kepala sekolah, guru, siswa, menerapkan belajar dari rumah (BDR). Dalam keadaan normal, pembelajaran model BDR (belajar di rumah) dan BDS (belajar di sekolah) bisa relatif sama tujuan dan kualitasnya hanya yang membedakan adalah sarana pendukung yang digunakan.

Belajar dari Rumah : Pembelajaran daring/jarak jauh, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, serta Aktifitas pembelajaran bervariasi, mempertimbangkan kesenjangan akses. Saat pelaksanaan belajar dari rumah, maka orang tua diharuskan melakukan pendampingan bagi anaknya, agar memiliki kemampuan seperti yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengoptimalkan peran orang tua di tengah pandemi covid-19 ini. Perlunya optimalisasi ini agar apa yang diharapkan oleh satuan pendidikan serta orang tua terhadap pemenuhan target pembelajaran dapat terpenuhi dengan sebaik baiknya. Tentunya yang bertindak sebagai orang tua adalah ayah dan ibu.

Peranan yang dimaksud adalah suatu konsep tentang apa

yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Secara Esensi ayah dan ibu di artikan memiliki satu arahan dan tujuan yang sama sertabsaling bekerja sama dalam **m e n g u p a y a k a n d a n** mengembangkan dasar-sadar disiplin diri pada anak. peran orang tua adalah sesuatu yang diharapkan oleh anak dari ayah dan ibunya.

Menurut Epstein (2009) dalam dionginanto (2017) membuat enam bentuk peranan atau penyertaan orang tua (parental involvement framework) pada pendidikan anak di sekolah.) sebagai berikut : *Volunteering* (menjadi tenaga sukarelawan di sekolah), *Learning at home* (membantu balajar siswa di rumah), *Parenting* (bentuk pengasuhan orang tua pada anak yang) *Communicating* (komunikasi dua arah: rumah-sekolah), *Decision making* (turut serta dalam membuat keputusan sekolah, jika perlu), dan *Collaborating with the community* (bekerja sama dengan masyarakat). Ada dua jenis peranan orang tua yang harus benar-benar diaktifkan di masa Covid-19 sebagai berikut : *Learning at home* intinya adalah bagaimana orangtua (termasuk di dalamnya: ibu, bapak, kakak, nenek, kakek, serta paman tau bibi) dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswi ketika berada di rumah terkait pekerjaan rumah (PR), proyek, atau sekedar untuk mempersiapkan materi yang akan dipelajari esok harinya dan *Parenting* adalah bentuk pengasuhan orang tua pada anak yang meliputi memberi makan, memberi bekal kehidupan, memberi perlindungan, dan mencukupi kebutuhan anak.

Cara mengoptimalkan peranan

orang tua adalah orang tua harus memberikan pendidikan kecakapan hidup dan mengenai pandemi COVID-19

Mengapa hal ini menjadi salah satu cara mengoptimalkan?. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa : kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mandiri terkait kecakapan hidup tentang pandemi COVID-19, orang tua dapat memberikan materi mengenai pola hidup bersih dan sehat atau PHBS yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. BAB III Permenkes RI ini, strategi PHBS dilaksanakan dalam 5 (lima) tindakan, yaitu: **Pertama**, mengembangkan kebijakan berwawasan kesehatan;



Kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung; **Ketiga**, memperkuat gerakan masyarakat; **Keempat**, mengembangkan kemampuan individu agar tahu, mau, dan mampu membuat keputusan yang efektif dalam memelihara, meningkatkan, serta mewujudkan kesehatan; **Kelima**, menata arah pelayanan dengan mengubah pola pikir mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif.

Manfaat dari penerapan kecakapan hidup melalui PHBS di lingkungan rumah antara lain: setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, Anak tumbuh sehat dan cerdas, Anggota keluarga giat bekerja, Pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga.

Bentuk kegiatan yang menjadi

kecakapan hidup anak terutama dalam PHBS dengan pendampingan orang tua. Bentuk kegiatan yang menjadi kecakapan hidup anak antara lain : Pola hidup sehat dengan melatih anak memiliki kebiasaan menjemur selimut, sejadah dan peralatan rumah lainnya dengan teratur. Anak memiliki keterampilan bagaimana meletakkan selimut yang sesuai dengan arah sinar matahari, yang mengakibatkan kuman atau bakteri yang menempel pada selimut, sajadah dan peralatan rumah lainnya bisa mati, Pola hidup bersih dapat melatih anak anak bagaimana menyapu lantai hingga bersih, mengepel lantai, membersihkan kaca jendela, dan



mencuci masker dan pakaian yang digunakan dengan benar dan teratur, Pemanfaatan Lahan untuk apotik hidup. Anak anak di masa pandemi ini dapat pula diberikan keterampilan hidup bagaimana bercocok tanam di rumah. Seperti menanam sayur mayur seperti bayam, kangkung, selada, sawi, atau bumbu dapur lainnya seperti lombok, tomat, jahe, lengkuas, kunyit dan bawang, Pemanfaatan barang bekas untuk keperluan sehari hari. Seperti pembuatan pot pot bunga dari bekas botol plastik, atau kerajinan tangan lainnya.

Bentuk lain seperti pemanfaatan kain perca untuk pembuatan masker, Keterampilan hidup dalam mengolah bahan makanan menjadi makanan yang sehat dan dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga.

Dari beberapa aktivitas penguatan keterampilan hidup tersebut, pastinya diperlukan optimalisasi peran dari orang tua dalam masa pandemi covid19. Satu hal yang dapat dijadikan pelajaran adalah bahwa Covid-19 telah mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi orangtua seutuhnya dan memberikan kecakapan hidup. Libur panjang sebagaimana kita jalani saat ini sudah semestinya dimanfaatkan oleh para orangtua untuk membangun hubungan emosional yang lebih baik dengan anak.

Daftar Pustaka

- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
SE Mendikbud RI no. 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan [Perilaku Hidup Bersih dan Sehat](#).
<https://dionginanto.blogspot.com> "Peran Orangtua di Tengah Virus Corona" diakses 13 juni 2020

SATUAN PENDIDIKAN

AMAN BENCANA (SPAB)

SIAPKAN GENERASI TANGGUH

Oleh
Yuda Purwaka, M.Or
Widyaiswara Ahli Madya
LPMP NTB



Permendikbud 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan Program Satuan Pendidikan agar aman dari bencana yaitu suatu upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di Satuan Pendidikan. Secara geografis Indonesia terletak di rangkaian lempeng Australia, Pasifik, dan Filipina, hal ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap perubahan geologis sehingga rawan terjadinya bencana. Data BPNB selama tahun 2018 terjadi bencana 2.572 bencana. Berikut rangkuman bencana besar yang terjadi yang mengakibatkan korban jiwa. Data bencana Secara umum bencana dapat dibedakan menjadi bencana sosial, bencana alam dan bencana non alam.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik korban jiwa maupun fasilitas pendidikan rusak. Sektor pendidikan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang diakibatkan oleh terjadinya bencana. Setiap anak mempunyai hak atas keselamatan dan kelangsungan hidup serta hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berkesinambungan. Hak hak anak sering terancam tidak terpenuhi diakibatkan adanya bahaya alam dan terkait bahaya teknologi yang menyebabkan terjadinya bencana besar maupun kecil.

Dalam permendikbud no 33 tahun 2019 dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Program SPAB adalah : (a). meningkatkan

kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana; (b). meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana; (c) memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak Bencana di Satuan Pendidikan; (d) memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana; (e) memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan; (f). memulihkan dampak Bencana di Satuan Pendidikan; dan (g). membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.

Siapa dan bagaimana Satuan Pendidikan Aman Bencana? Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah satuan Pendidikan yang menerapkan standar dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga satuan pendidikan dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Bagaimana program satuan pendidikan, berikut ruang lingkup pelaksanaan satuan pendidikan aman bencana meliputi 10 kegiatan:





1. Persiapan dan konsolidasi dengan pihak Satuan Pendidikan ; Persipan dan konsolidasi dengan seluruh warga satuan pendidikan sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman bersama berkaitan dengan program satuan pendidikan aman bencana.
2. Pengkajin dan Penilaian mandiri

- di awal program ; Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kajian dampak bencana dan menentukan langkah langkah penanggulangannya.
3. Pelatihan untuk pendidik, tenaga kependidikan lainnya, serta komite sekolah; Melakukan pelatihan pendidik, tenaga kependidikan serta komite untuk meningkatkan kapasitas dalam mengantisipasi dampak bencana.
 4. Pelatihan untuk peserta didik : Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengantisipasi dampak bencana, agar mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan melakukan penyelamatan diri.
 5. Pengkajian resiko bencana

bersama, termasuk dengan peserta didik : Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui ancaman bencana yang mungkin terjadi dn resiko dari terjadinya bencana. Dengan dasar hasil kajian satuan pendidikan mampu mempersiapkan diri dan membekali warga sekolah hal-hal yang perlu dipesiapkan. Metode kajian resiko bencana dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu a. Sejarah kejadian bencana, b. Kalender ancaman bencana, c. Matriks ancaman, d. Jalan transek, e. Pemetaan ancaman, f. Identifikasi kerentanan, g. Identifikasi kapasitas, h. Kajian resiko, dengan format kajian seperti dibawah ini :

No	Jenis ancaman	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penyebab	Sumber info
1	Banjir											x	x	Hujan lebat	BMKG

6. Penyusunan rencana aksi dan pembentukan tim siaga bencana satuan pendidikan ; Rencana aksi disusun oleh

seluruh warga satuan pendidikan yaitu Pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, komite dan orang tua

peserta didik. Untuk membantu melakukan rencana aksi bisa menggunakan tabel dibawah ini :

Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Waktu	Jumlah dana	Sumber pendanaan	Pelaksana

7. Penyusunan prosedur tetap untuk masa pra, saat dan paska bencana ; Prosedur tetap disusun untuk memberikan gambaran jelas siapa melakukan apa, individu atau tim, komunikasi dan koordinasi, wewenang dan tanggung jawab. Memperjelas peran dan fungsi

masing masing posisi dalam situasi darurat (termasuk pada saat simulasi/gladi) serta memperjelas alur tugas dan wewenang tanggung jawab petugas.

8. Melakukan simulasi teratur sebanyak 2 kali setahun ; Simulasi dilakukan untuk

melakukan apa yang sudah dituangkan dalam prosedur tetap sehingga akan mendapatkan gambaran nyata pada saat terjadi bencana.

9. Melakukan penilaian mandiri dan pengawasan secara rutin ; Untuk mengetahui kekurangan kendala dalam pelaksanaan

Kajian Utama

program diperlukan penilaian dan pengawasan sehingga diketahui kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam prosesnya.

10. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan memutakhirkan rencana aksi; Tingkat keberhasilan penyelenggaraan program dapat diketahui dengan melakukan evaluasi secara keseluruhan untuk mendapatkan program mana yang tidak bisa berjalan, kekurangan dan kendala sebagai bahan pemutakhiran rencana aksi.

Penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman bencana yang melibatkan seluruh warga satuan pendidikan yaitu pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, komite dengan menitik beratkan pada keselamatan seluruh warga satuan pendidikan.

Pelibatan peserta didik dalam program dan berbagai bentuk kegiatan akan menjadikan pengalaman dan ketrampilan peserta didik pada sebelum, saat dan setelah terjadi bencana. Secara tidak langsung hal ini membentuk peserta didik yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Berkaitan dengan pandemi yang sedang terjadi yaitu covid19 satuan pendidikan yang telah melaksanakan program SPAB akan sangat membantu untuk mempersiapkan diri menghadapi kebiasaan baru. Dengan membekali peserta didik yang tergabung dalam tim

siaga akan sangat membantu pemberlakuan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan. Jaga jarak, memakai masker, cuci tangan dan pembiasaan hidup bersih sehat. (yuda)



Rujukan :
Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kemdikbud. 2019.
Permendikbud no. 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana

ANJURAN PEMERINTAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN COVID-19



STRATEGI PENERAPAN KEGIATAN BELAJAR DI MASA PANDEMI COVID -19

Sejak Maret 2020 awal dimulainya pandemi covid-19 hingga sekarang, wabah virus corona masih terus menghantui sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang sampai saat ini masih terus meningkat jumlah pasien yang terinfeksi virus corona ini. Hal ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia, dimulai dari pembiasaan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menghindari kerumunan, jaga jarak setidaknya 1,5 meter, selalu mencuci tangan setelah menyentuh sesuatu dan tidak langsung menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan. Penerapan protokol kesehatan ini juga berdampak pada bidang pendidikan.

Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) menyebutkan bahwa proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna

bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemic covid-19, aktivitas dan tugas belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah di beri umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Pada peringatan hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei 2020 lalu, Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) melalui Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan dasar dan menengah, Hamid Muhammad menjelaskan, sebagai upaya untuk menegakkan kegiatan belajar mengajar di tengah covid-19 ini dan hal ini juga diatur dalam surat Edaran nomor 4 tahun 2020 yang memuat 4 (empat) hal utama yaitu *pertama* adalah pembelajaran secara daring, baik



Oleh : T. Teguh Raharjo, S.Pd
(Guru SMK Negeri 1 Mataram)

secara interaktif maupun non interaktif. Hal ini perlu dilakukan meskipun tidak semua anak dapat melakukan hal tersebut karena factor infrastruktur. Hal ini merupakan hal yang penting karena pembelajara harus dilakukan di rumah. Pembelajaran yang dilakukan dengan memilih materi-materi yang esensial yang perlu dilakukan anak-anak di rumah.

Kedua, adalah tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada siswa tentang kecakapan hidup yaitu pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pada pemahaman tentang covid-19, bagaimana karakteristiknya, cara menghadapinyan dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. Ketiga adalah pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak termasuk akses internet dan jaringan yang tersedia di lingkungan rumah siswa. Keempat adalah bagi para tenaga pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswatidak harus dinilai seperti biasanya di Sekolah, akan tetapi penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa kelompok pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah selama pandemi Covid-19, yakni sekolah yang



menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara penuh dan memanfaatkan berbagai platform pendidikan daring, sekolah yang masih menerapkan semidaring, yang mana tugas dikirim melalui aplikasi pesan dan tidak ada interaksi langsung, dan yang tidak memiliki akses internet, listrik, maupun televisi

Untuk mengakomodir surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan itu perlu juga diatur prosedur pembelajaran dan interaksi yang akan dilakukan oleh seluruh personil sekolah, pengaturan interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antar siswa, warga sekolah dan masyarakat sekitarnya harus diminimalisir. Jika pembelajaran jarak jauh ini akan diterapkan maka konsekwensinya adalah guru-guru harus mampu menguasai teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang akan digunakan pada pembelajaran daring. Pada saat ini penguasaan TIK mutlak diperlukan oleh setiap orang termasuk oleh guru dalam proses pembelajaran. Untuk mengakomodir surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan itu perlu juga diatur prosedur pembelajaran dan interaksi yang akan dilakukan oleh seluruh personil sekolah, pengaturan interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antar siswa, warga sekolah dan masyarakat sekitarnya harus diminimalisir. Jika pembelajaran jarak jauh ini akan diterapkan maka konsekwensinya adalah guru-guru harus mampu menguasai teknologi, informasi dan



komunikasi (TIK) yang akan digunakan pada pembelajaran daring. Pada saat ini penguasaan TIK mutlak diperlukan oleh setiap orang termasuk oleh guru dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah mengalami penyesuaian, yang biasanya pembelajaran



dilakukan dengan metode konvensional sekarang dilakukan dengan metode daring yang disebut juga pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik dilakukan secara daring (dalam jaringan atau online), luring (luar jaringan atau offline) dan gabungan keduanya (blended learning) menjadi andalan bagi pendidikan untuk tetap memberikan layanan pendidikan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran 2019/2020 dan kemungkinan akan tetap diterapkan pada tahun pelajaran 2020/2021 jika covid-19 ini masih tetap mewabah. Pembelajaran jarak jauh ini juga dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Secara tidak langsung pendidikan kita saat ini telah resmi bergabung dengan revolusi teknologi sehingga tercipta sebuah fenomena yang dinamakan dengan pembelajaran digital (*digital education*). Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang selama ini menggunakan papan tulis telah digantikan oleh Smartboard, kertas dan pena telah digantikan dengan laptop, dan buku pelajaran telah

digantikan oleh Tablet. Secara tidak langsung pula akibat pandemic Covid 19 ini siswa saat ini merupakan generasi pertama yang tumbuh dalam dunia digital. Ponsel, pemutar DVD portabel, permainan komputer, pesan singkat (short message service) dan iPod merupakan perangkat sehari-hari yang digunakan siswa bahkan digunakan untuk pembelajaran saat ini.

Tantangan yang dihadapi oleh sekolah masa depan adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang melampaui dan meningkatkan kemampuan siswa dan diperkuat dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dan dibutuhkan untuk sukses dalam masyarakat global. Tidak hanya siswa, gurupun harus familiar dan melek teknologi informasi ini.

Meskipun dalam proses belajar dan mengajar (PBM), seorang pengajar tidak dapat digantikan oleh teknologi dan pembelajaran tradisional tidak bisa benar-benar ditinggalkan, tetapi setidaknya pembelajaran digital menjadi sangat penting karena memiliki beberapa kelebihan seperti berikut ini:

- **Accessibility:** melalui website, telepon, dan tablet, materi pelajaran dapat diangkut keluar dari kelas dan menawarkan kesempatan kepada pembelajar untuk dapat belajar dimanapun dan kapanpun tanpa batas.
- **Greater engagement:** dengan kemampuan teknologi, pembelajaran secara digital dapat melibatkan siapapun termasuk pembelajar yang memiliki gaya belajar berbeda-beda.
- **Appeals to the "digital native" population:** saat ini pembelajar sangat akrab dengan teknologi baru, dengan menggunakan alat yang sesuai dengan kebutuhan dan kesenangan pembelajar setidaknya pembelajar akan lebih termotivasi untuk belajar.

- Supporting resources for teachers: selain memberikan dukungan kepada pembelajar, teknologi dalam pendidikan dapat menyediakan sumber daya untuk pengajar, sehingga mereka dapat dengan mudah berkolaborasi dengan rekan-rekan pengajar maupun dengan pembelajar.
- Learning analytics: dengan menggunakan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar secara digital, pengajar dapat menganalisis dan mengukur kegiatan belajar, menilai kemajuan pembelajar dan membimbing pelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajar.
- Easy updates: materi yang dibuat secara digital jauh lebih mudah untuk diperbaiki/diperbaharui daripada teks tercetak, hal ini bisa dilakukan untuk menjaga kualitas materi pelajaran yang disampaikan kepada pembelajar.

Di dalam pelaksanaan pembelajaran ini terdapat berbagai manfaat yang diperoleh oleh pembelajar. Pembelajaran berbasis teknologi ini mendorong siswa atau guru untuk meningkatkan pengetahuan dan prestasi dalam penggunaan teknologi yang terkini. Selain menambah ilmu juga dapat menaikkan taraf penggunaan media di dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Selain dari itu, pelaksanaan pembelajaran secara online kedua belah pihak dapat berinteraksi dan memberikan pendapat dalam forum yang telah

dise
diak
an .
Mel
alui
foru



ini pembelajar akan mendapat banyak umpan balik (feedback) dan kemudian memberi respon yang sewajarnya bagi sesuatu topik yang dibincangkan. Melalui interaktivitas pembelajar akan mencari banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu, kreativitas, inovasi dan membina pengetahuan baru mengenai sesuatu konsep dan pemahaman. Secara tidak langsung pembelajaran jarak jauh dengan daring atau online ini dapat menjadikan pembelajar sebagai pribadi yang mandiri dan peka terhadap pembelajaran yang dialaminya.

Aktivitas pembelajaran jarak jauh bagi Siswa SMKN 1 Mataram ini mulai dilakukan sejak memasuki masa pandemi covid-19, selama ini pembelajaran dalam jaringan atau online ini masih sebatas sosialisasi dan merupakan salah satu muatan pelajaran di sekolah yang diajarkan secara

tatap muka, tetapi dengan adanya pandemi covid-19 ini, seluruh elemen sekolah, baik kepala sekolah guru, siswa hingga tenaga administrasi yang menerapkan protokol kesehatan sehingga tatap muka diminimalisir.

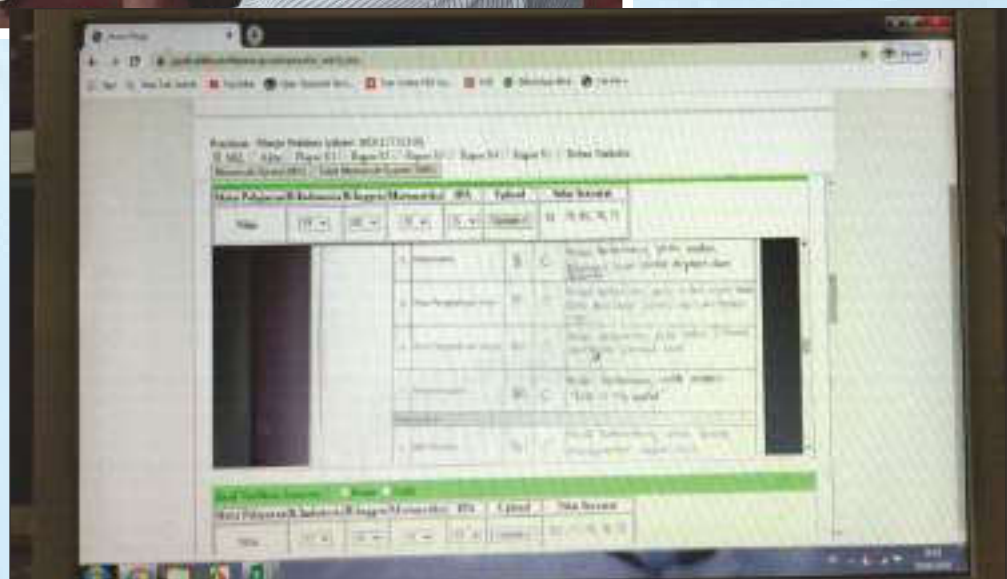
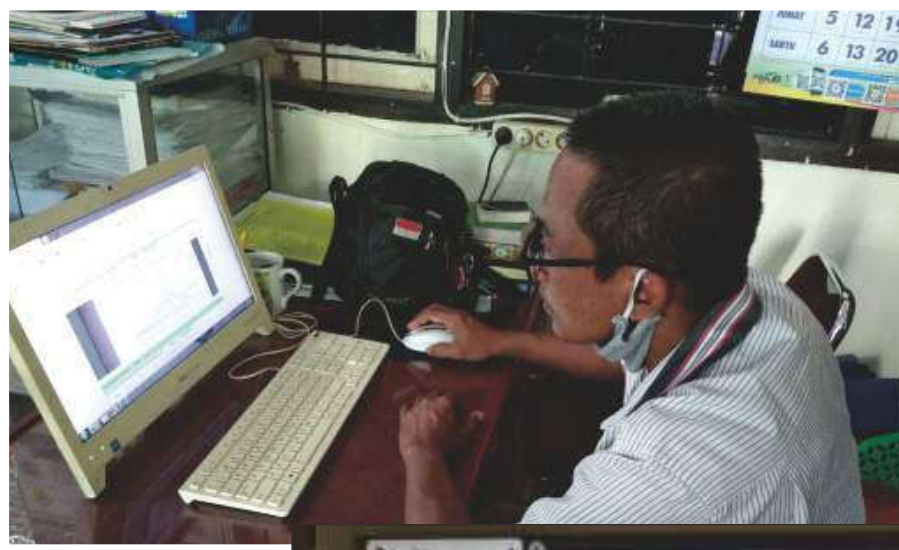
Sebagai salah satu muatan pelajaran pada salah satu mata pelajaran TIK kegiatan belajar yang dilakukan siswa secara umum dapat digambarkan siswa mengikuti pembelajaran berbasis digital untuk mata pelajaran tertentu dengan jadwal tertentu, dilakukan ditempat terpisah dengan syarat waktu kelas tetap disepakati bersama oleh siswa dan guru, Di

bawah bimbingan guru, siswa mengikuti proses pembelajaran melalui digital.

Para peserta didik secara umum sudah banyak yang melek TIK, bisa mengoperasikan smartphone, bahkan lebih piawai dari orang tuanya, sehingga, menurut saya, mereka pada dasarnya siap kalau harus mengikuti pembelajaran daring dengan menggunakan media digital, asal ada sarana, sinyal internet yang stabil, dan kuota internet yang memadai.

Justru yang kesulitannya adalah para orang tua, karena disamping banyak yang gptek, juga banyak memang kebingungan bagaimana cara memandu dan mendampingi anaknya belajar dari rumah, sehingga kadang terjadi perkecokan antara dia dengan anaknya. Belum lagi membengkaknya kebutuhan kuota internet yang tidak dapat dipungkiri menjadi beban baru bagi orang tua, sehingga perlu dicari jalan keluar oleh pemerintah agar kuota internet untuk sarana belajar bisa lebih ringan atau bahkan jika memungkinkan bisa digratiskan.





Sumber Bacaan

- National Program in Poland. 2012. "Digital School"
<http://creativecommons.pl/open-educational-resources-in-the-digital-school-program/Open-Educational-Resources-in-the-„Cyfrowa-szkola>"
- Smaldino, Sharon. Lowter, Deborah. Russel, James D. 2011. *Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indrajit, 2011. Prof. Richardus Eko. "Teknologi Informasi dan Perguruan Tinggi: Menjawab Tantangan Pendidikan Abad 21".
<http://issuu.com/ocwconsortium/docs/buku-rei-tik->
- Tri Mulyani, Widyaiswara LPMP Jawa Tengah, 2013. "Penerapan E- Learning Portofolio Pada Diklat sebagai Upaya Peningkatan Profesionisme Guru Yang Mendunia", <http://www.lpmpjateng.go.id>
- <https://kantor24.bisnis.com>. Belajar Dalam Pandemi Covid-19

PENDEKATAN ETNOSAINS

TRADISI PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI LOMBOK SEBAGAI PENUNJANG PEMBELAJARAN IPA SMP KELAS 7

Oleh :

KASMAH HARWATI S.Pd

(Guru SMP Negeri 11 Mataram)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003). Pendidikan berpotensi untuk mewariskan, mengembangkan dan membangun peradaban dalam masyarakat di masa yang akan datang. Pendidikan dan kepercayaan yang dianut dapat mempengaruhi tradisi dan adat istiadat dalam masyarakat yang akan membentuk latar belakang pemahaman awal siswa.

Cobern dalam Edy Tandililing (2014) menegaskan bahwa Pengaruh latar belakang yang dimiliki siswa terhadap proses pembelajaran sains ada dua macam. Pertama, pengaruh positif akan muncul jika materi pada pembelajaran sains di sekolah yang sedang dipelajari selaras dengan pengetahuan (budaya) siswa sehari-hari. Pada keadaan ini proses pembelajaran mendukung cara pandang siswa terhadap alam sekitarnya. Proses pembelajaran yang seperti ini disebut dengan pembelajaran inkulturasi (inculturation). Sebaliknya, proses pembelajaran sains di kelas menjadi 'pengganggu' ketika materi pelajaran sains tidak selaras dengan latar belakang budaya

sumber :

www.beepdo.com

oleh katrina abidin 19 November 2019

yang sudah mengakar pada diri siswa, serta guru berusaha untuk 'memaksakan' kebenaran materi pelajaran sains/IPA dengan cara memarginalisasikan pengetahuan (budaya) siswa sebelumnya.

Masyarakat Lombok atau Sasak sebagai sebuah kelompok masyarakat memiliki tradisi dan adat istiadat dipelihara secara turun menurun. Masyarakat Sasak sebagian besar beragama Islam, dikenal religius serta kental dalam mempertahankan tradisi. Sebagai kaum muslim, mereka mewujudkan sikap religiusitas itu dalam pola kehidupannya. Hal ini tercermin pada motivasi mereka dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, salah satunya merayakan peringatan hari besar Islam, khususnya Maulid Nabi besar Muhammad SAW.

Rangkaian kegiatan dalam memperingati Maulid

Nabi Muhammad SAW dilaksanakan dengan tujuan untuk merangsang dan memotivasi rasa cinta dan taat kepada Allah SWT dan mampu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dengan konsisten. Secara umum tujuan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lombok adalah sebagai ajang kumpul bersama, dalam rangka silaturahmi sekaligus memupuk dan membangun kembali rasa kekeluargaan. Memperkenalkan sejak dini kepada anak-anak mereka tentang kisah Baginda Rasulullah SAW dari silsilah keturunannya, keluarganya, hingga jasa-jasanya. Memberikan pembelajaran untuk lebih mengenal Allah sebagai Tuhan (Salmiah, 2018).

Pada puncak acara peringatan maulid Nabi masyarakat berkumpul di masjid dalam acara majelis untuk mendengarkan

Kajian Utama

ceramah dan pengajian dan ibu-ibu menyiapkan konsumsi. Konsumsi yang dibuat dihidangkan dalam *dulang*. *Dulang* dalam perayaan Maulid Nabi ada dua jenis yaitu *dulang nasi* dan *dulang jaje*. *Dulang nasi* berisi nasi dengan lauk pauknya. *Dulang jaje* berupa jajanan lokal biasanya berisi *Nasi Rusul*, *Jaje Bawang*, *Jaje Goreng*, *Jaje Peyek*, *Poteng*, *Jaje Tujak*, *Kaliadem*, *Kuping Gajah*, *Renggi*, *Angin-Angin*, *Wajik*, *Pangan*, dan lain sebagainya (Zaenuddin Mansyur. 2005). Dari jenis-jenis *jaje* yang ada, *Nasi Rusul* adalah jajanan yang memiliki makna mendalam bernilai filosofis dan wajib ada. *Nasi Rusul* merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar beras ketan yang jika dimasak memiliki tekstur lengket satu sama lain, memiliki filosofi menanamkan sikap cinta dan kasih sayang yang lengket kepada Rasulullah dengan mentaati segala sunnah yang telah disampaikan olehnya. Selain filosofi tersebut juga mengandung simbol rasa syukur, kegembiraan dan suka cita umat Islam atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Makanan tradisi *Nasi Rusul* khas Lombok dibuat dengan bahan dasar beras ketan yang dikukus dengan ditambahkan santan diberi pewarna kuning dari kunyit. Dihidangkan dengan serundeng, ayam suwir dan taburan bawang goreng sebagai pelangka

sajiannya. Makanan tradisi (*Nasi rusul*) dapat digunakan sebagai tema dalam proses pembelajaran. Salah satunya dapat diintegrasikan pada mata pelajaran IPA. Nilai-nilai budaya yang merupakan kearifan lokal dari tradisi perayaan Maulid Nabi SAW digali dan dijadikan media dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran ilmu sains yang memperhatikan kearifan budaya lokal sebagai jati diri

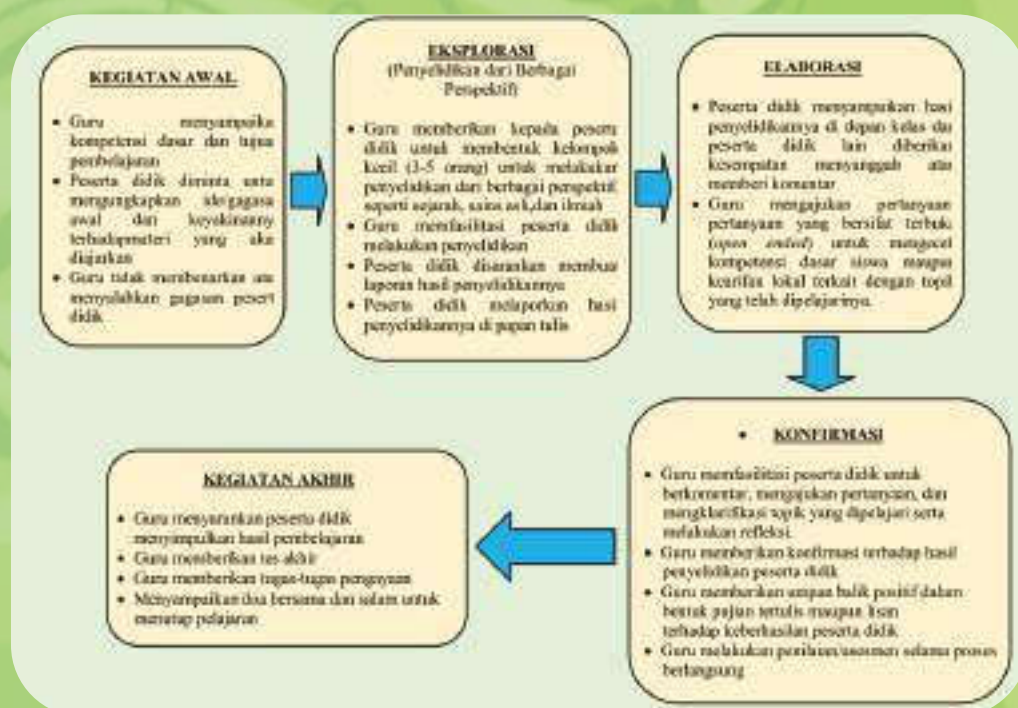
bangsa, karakter dan adat istiadat budaya lokal dinamakan pembelajaran berpendekatan etnosains. Wiwin puspita (2010). Menurut Sudarmin dalam Wiwin Puspita (2015) pembelajaran berpendekatan etnosains sangat penting karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai kebudayaan yang harus dilestarikan.

B . A L U R P E M B E L A J A R A N ETNOSAINS

Dalam proses pembelajaran sains berbasis budaya lokal (etosains) pengembangan kompetensi dasar sains dapat diimplementasikan dengan metode pembelajaran yang relevan, antara lain penyelidikan/eksperimen, observasi lapangan atau diskusi kelompok. Sedangkan sumber belajar yang mendukung dapat bersumber pada lingkungan

alamiah, lingkungan sosial budaya, buku-buku pelajaran dan buku lainnya serta audio visual.

Implementasi pendekatan *etosains* menuntut pergeseran model pembelajaran dari pembelajaran *teacher center* ke pembelajaran *student center*, dari pembelajaran individual ke pembelajaran kolaboratif dengan penekanan aplikasi pengetahuan sains, kreativitas, pemecahan masalah dalam proses merekonstruksi sains asli (pengetahuan yang berkembang di masyarakat). Dengan demikian proses pembelajaran tidak hanya sebatas *transfer of knowledge* tetapi juga sebagai sarana *transfer of culture*. Menurut Suastra (2010) tahapan pembelajaran sains berbasis budaya dan kearifan lokal (etosains) dapat diuraikan pada alur Kegiatan Pembelajaran berikut:



C. ANALISIS ETNOSAINS DALAM PROSES PEMBUATAN JAJAN NASIRUSUL

a. Analisis karakter dan keilmuan

1. Analisis karakter

- Segi keagamaan

Wujud rasa kepercayaan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah swt dan menumbuhkan kecintaan terhadap Rasul dan meneladani sifat-sifat Rasul.

- Segi budaya

Melestarikan kebudayaan daerah, sebagai sumber dari kebudayaan nasional yang harus dilestarikan, dalam pelaksanaannya terdapat nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.

2. Analisis keilmuan IPA

a) Ilmu Biologi

- **Media pembelajaran** kandungan bahan makanan

Kandungan bahan makanan yang digunakan pada proses pembuatan nasi rusul, misalnya kandungan beras ketan, kandungan ayam, kandungan buah kelapa dapat dilakukan dengan praktek uji bahan makanan pada bahan tersebut.

- **Media pembelajaran** perkembangbiakan tumbuhan
Tambahkan bahan makanan yang digunakan pada bumbu, misalnya bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, daun salam, cabai dapat digunakan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan.

- **Media** mengenalkan nama ilmiah tumbuhan

Selain digunakan untuk media perkembangbiakan tumbuhan bahan bumbu juga dapat digunakan untuk mengenalkan

nama-nama ilmiah dari tanaman-tanaman tersebut dan melakukan pengklasifikasian berdasarkan karakteristik diamati.

a) Ilmu Fisika

- **Media pembelajaran besaran dan satuan**

Pada komposisi bahan dapat digunakan sebagai media pembelajaran besaran dan satuan yang digunakan, misalnya pada bahan dasar besar ketan 1 kg, bawang merang 6 siung, dari dua bahan yang digunakan dapat digunakan untuk membedakan konsep satuan baku dan satuan tidak baku.

- **Media pembelajaran perubahan fisika dan perubahan kimia**

Pada proses pembuatan santan dan serundeng terdapat perubahan fisika dari kelapa yaitu kelapa yang semula utuh bulat diparut menjadi ukuran kecil-kecil, secara keilmuan hal ini tujuan memperbesar luas permukaan kelapa sehingga memudahkannya untuk mengeluarkan sari pati kelapa (santan).

Selain kelapa, penumbukan bumbu-bumbu juga merupakan perubahan fisika, bawang merah, bawang putih, ketumbar dan bumbu lain dihaluskan dari bentuk bulat-bulat di jadikan berbentuk halus. Perubahan kimia terdapat pada proses beras ketan menjadi nasi rusul, kelapa parut yang dimasak menjadi serundeng dan ayam yang dimasak menjadi ayam suwir.

b) Ilmu Kimia

- **Media pembelajaran campuran**

Bumbu dengan ayam pada proses pembuatan ayam suwir juga merupakan konsep campuran,

dimana bahan-bahan penyusunnya masih terlihat dan dapat dipisahkan.

- **Media pembelajaran larutan**

Pada proses pembuatan santan terdapat konsep larutan yaitu percampuran antara air dengan kelapa yang kemudian diperas untuk mendapatkan santan.

- **Media pembelajaran unsur dan senyawa**

Garam, air dapat digunakan untuk pembelajaran unsur dan senyawa dengan diawali mengenalkan rumus kimia dari bahan tersebut, kemudian diuraikan unsur-unsur penyusunnya.

a. Kompetensi Dasar SMP kelas 7

Kompetensi dasar ranah pengetahuan dan keterampilan yang termuat dalam silabus SMP kelas 7 berdasarkan kurikulum 2013 sebagai berikut:

3.1. Memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik sekitar sebagai bagian dari observasi, serta pentingnya perumusan satuan terstandar (baku) dalam pengukuran

4.1. Menyajikan hasil pengukuran terhadap besaran-besaran pada diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku

3.2. Mengklasifikasikan Makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati.

4.2. Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.

Kajian Utama

3.3. Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari.

4.3. Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan

sehari-hari.

3.4. Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan.

4.4. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor

terhadap suhu wujud benda serta perpindahan kalor.

3.5. Menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis.

4.5. Menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis.

Hubungan antara proses pembuatan *nasi rusul* dengan kompetensi dasar pada tingkatan SMP sebagai berikut :

Kompetensi Dasar	Konsep sains pada proses pembuatan nasi rusul
3.1. Memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri, makhluk hidup, dan lingkungan fisik sekitar sebagai bagian dari observasi, serta pentingnya perumusan satuan terstandar (baku) dalam pengukuran.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan besaran dan satuan yang sesuai pada komposisi bahan. • Satuan baku dan tidak baku yang digunakan sebagai ukuran dalam komposisi bahan.
3.2. Mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati.	Memahami nama-nama ilmiah dari tanaman-tanaman bahan bumbu dan melakukan pengklasifikasian berdasarkan karakteristik tanaman yang teramati.
3.3. Menyajikan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • Nama-nama senyawa yang terdapat dalam bahan pembuatan nasi rusul. • Campuran, larutan dan pemisahannya pada proses pembuatan santan, nasi rusul, ayam suwir dan serundeng. • Perubahan fisika dan perubahan kimia pada proses pembuatan nasi rusul.

Berdasarkan hubungan tersebut, proses pembuatan *nasi rusul* sebagai jajanan lokal pengisian dulang dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan media pembelajaran IPA tingkat SMP kelas 7 pada kompetensi 3.1, 3.2 dan 3.3 dengan materi Klasifikasi Materi dan Perubahannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis etnosains tradisi peringatan Maulid Nabi SAW dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Pada tradisi tersebut terdapat pembelajaran karakter berupa nilai-nilai religious, kebersamaan, kekeluargaan dan pelestarian budaya. Sedangkan dari sudut

pandang sains salah satu proses pembuatan jajanan pelengkap sajian peringatan Maulid Nabi SAW. *Nasi Rusul* yang memiliki filosofi menanamkan sikap cinta dan kasih sayang yang lengket kepada Rasulullah dengan mentaati segala sunnah yang telah disampaikan olehnya yang mengandung simbol rasa syukur, kegembiraan, dan suka

cita umat Islam atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. mengandung konsep fisika, biologi dan kimia. Konsep-konsep sains pada proses pembuatan *Jaje Nasi Rusul* dapat dijadikan media pembelajaran IPA secara utuh pada peserta didik tingkat SMP kelas 7.



Daftar pustaka

- Edy Tandililing, 2014. Pengembangan Etnosains Dalam Pembelajaran Pendidikan Sains Di Sekolah. <https://fkip.untan.ac.id> juli 23
- kurikulum 2013
- Salmiah, 2018. Analisis Makna Simbol Pada Acara Ritual Agama Maulid Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam Di Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur "Semiotika Roland Barth, *Skripsi* Universitas Mataram Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Dan Daerah
- Suastra I Wayan, 2010 Model Pembelajaran Sains Berbasis Budaya Lokal Untuk Mengembangkan Kompetensi Dasar Sains Dan Nilai Kearifan Lokal Di SMP, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Jilid 43, Nomor 2, April, hlm. 8-16 Fakultas MIPA, Universitas Pendidikan 85.
- Ganesha
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wiwini Puspita Hadi dan Mochammad Ahied. 2017 Kajian Etnosains Madura dalam Proses Produksi Garam sebagai Media Pembelajaran IPA Terpadu, *Jurnal Ilmiah Rekayasa* Volume 10 No 2.
- Zaenuddin Mansyur, 2005. Tradisi Maulid Nabi Dalam Masyarakat Sasak, *Ulumuna*, Volume IX Edisi 15 Nomor 1 Januari-Juni 2005 Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2009),

MEMAHAMI HIKMAH NUZULUL QUR'AN

DALAM SILATURRAHIM FITRIYYAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Oleh : Muhammad Idrus, M. Ag
Subbag Umum LPMP NTB

(disunting dari Kajian Islami Ramadhan LPMP NTB via Zoom Meeting, tanggal 21 Mei 2020)



A. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hidayah

Bagi keyakinan kaum muslimin muslimat, Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang dapat menjawab tantangan zaman dan kondisi apapun. Al-Qur'an menjadi sumber petunjuk dan cahaya kehidupan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh menggali inti/hikmah didalamnya agar tidak tersesat di dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwa umat Islam tidak akan pernah tersesat jikalau mereka berpegang teguh pada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk berupaya memahami dan mempelajari isi kandungan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW agar dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Isi kandungan kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu ada yang berbentuk terbaca dan tidak terbaca; atau dalam istilah Bahasa Arabnya, petunjuk yang berupa qauliyyah dan kauniyyah. Ayat atau teks qauliyyah (tertulis) dapat dipahami dengan sungguh-sungguh mempelajari dan menguasai Bahasa Arab (sebagai Bahasa pengantarnya) disertai penjelasan-penjelasan yang sudah tersebar pada banyak karya para ulama dan cendekiawan muslim.

Sedangkan, dalam memahami petunjuk-petunjuk kauniyyah (tidak tertulis) dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, umat Islam harus menguasai ilmu-ilmu bantu agar tidak salah menerapkannya demi

menyempurnakan ibadahnya. Contohnya dalam hal ini adalah penguasaan terhadap ilmu astronomi dalam menentukan arah kiblat sholat lima waktu dan menentukan awal dan akhir bulan suci Ramadhan. Atau contoh lain bantuan ilmu strategi perang seperti menghilangkan wabah penyakit menular seperti yang terjadi di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Untuk melawan dan mengantisipasi seperti itu, sayyidina Kalifah Umar ibn Khattab memerintahkan kepada rakyatnya untuk beristigfar memohon ampun kepada Allah serta menyuruh mereka segera beranjak naik ke atas bukit/tempat yang lebih tinggi (evakuasi diri) untuk menghindari sumber penyakit saat itu. Dalam menyikapi kondisi seperti penyebaran massif wabah Covid-19 yang melanda negeri ini, khususnya umat Islam memerlukan tidak hanya himbauan para tokoh pemerintah untuk menjaga kebersihan/kesehatan diri, tempat bekerja, tempat ibadah, dan lingkungan, namun lebih dari itu adalah memberikan peran strategis pada ilmu pengetahuan lainnya untuk menyegerakan kesembuhan dan keselamatan umat manusia dari penyakit menular.

Dalam konteks puasa Ramadhan, bahwa upaya meraih puncak predikat dari pelaksanaan puasa itu adalah mendapatkan predikat *Muttaqin*. *Muttaqin* disini dapat diartikan dengan orang yang bertaqwa. Prof. DR. TGH. Fahrurrizi Dahlan, MA dalam mengawali kajian Ramadhannya yang diadakan lewat *zoom meeting* kepada jama'ah pengajian muslimin muslimat LPMP NTB menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki upaya sungguh-sungguh meraih predikat *muttaqin* ada lima (5) kondisi/hal, yaitu sebagai berikut;

1. Beriman kepada Allah SWT
2. Menjaga Diri baik di saat sendiri maupun bersama orang lain
3. Memiliki Kecerdasan/berilmu
4. Selalu bersabar dan bersyukur dalam segala hal/kondisi
5. Meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukannya (amal sholeh) itu bersumber dari pemahamannya terhadap kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mendapatkan hidayah dan ridlo Allah SWT.

B. Silaturahmi Fitriyyah di Tengah Pandemi Covid-19

Sejak diumumkannya situasi tanggap darurat nasional karena wabah pandemik Covid-19 oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 14 Maret 2020, wajah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi berubah sedikit demi sedikit. Saran pemerintah kepada rakyatnya untuk selalu waspada terhadap penyebaran Covid-19 berdampak luas dari pusat kota ke pelosok negeri. Aspek ibadah ritual yang sebelumnya dilakukan secara berjamaah di tempat ibadah khusus, pelan tapi pasti dihimbau untuk dilakukan di rumah saja. Begitu juga dengan aspek pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pindah dari ruang kelas ke rumah masing-masing murid. Bisa dibayangkan, betapa cepatnya dampak yang ditimbulkan oleh serangan wabah pandemik Covid-19 ini sehingga terjadi perubahan secara drastis hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia. Ada kondisi yang justru sangat menarik untuk dicermati dalam situasi pandemik Covid-19, yaitu bagaimana nanti kondisi tradisi hubungan silaturahmi umat Islam pada saat Idulfitri 1441 H.

Kenyataannya, seminggu sebelum hari raya Idulfitri, sepertinya tak membuat banyak masyarakat untuk gentar pergi ke pusat kota ataupun tempat-tempat belanja untuk membeli barang atau bahan pokok lainnya demi merayakan hari yang suci itu. Antusiasme masyarakat seperti ini menandakan kurangnya sikap kooperatif dalam mengindahkan protokol kesehatan yang sudah disarankan pemerintah jauh-jauh hari. Banyaknya masyarakat yang berdesak-desakan di pasar atau di Mal serta ditambah kurang sadarnya mereka dalam menggunakan masker adalah salah satu indikasinya. Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan besar **apakah kebanyakan masyarakat lebih mementingkan aspek penampilan luar ibadah daripada mementingkan kewaspadaan untuk menjaga kesehatan sesama sekaligus keselamatan nyawa manusia lainnya?**

Di lain pihak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di pusat maupun daerah bersama pemerintah daerah juga telah beberapa kali memberitahukan dan memperingatkan masyarakat terutama umat muslim untuk sebaiknya menjalankan rangkaian ibadah puasa Ramadhan dan sholat idulfiti di rumah saja bersama keluarga. Dalam kenyataannya di lapangan bahwa sangat tidak mudah untuk mengubah tradisi masyarakat yang sudah mengakar untuk sesegera mungkin beralih kepada sikap atau perilaku yang baru sesuai dengan harapan pemerintah. Di samping itu juga, bahwa masyarakat sepertinya sudah lama tinggal di rumah dengan dinamika sosial terbatas (**social distancing**) dan oleh karenanya membawa mereka kepada keadaan stress sehingga mereka menemukan momen menyambut Idulfitri sebagai pelampiasannya.

Silaturahmi fitriyyah secara online/daring yang mereka kenal dari himbauan klan televisi selama ini sepertinya belum menjadi

pilihan tepat dalam menggantikan bentuk silaturahmi sesuai tradisi sebelumnya. Intimasi secara fisik di antara pelaku silaturahmi menurut kebanyakan mereka adalah lebih tepat, penuh makna sakral dan kesyahduan. Sedangkan, silaturahmi fitriyyah daring hanyalah lebih kepada opsi alternatif saja.

Dengan demikian bahwa jika kita berada dalam situasi dan posisi yang sulit seperti itu, maka sikap bijaklah yang mampu kita kedepan dalam meraih solusi yang dapat menyelamatkan nasib kesehatan sesama manusia di tengah wabah pandemik Covid-19. Kita sejatinya tidak ingin mendengar lagi ada di antara anggota keluarga kita atau juga tetangga kita yang tiba-tiba terindikasi sebagai PDP (pasien dalam pemantauan) sehingga dijemput mobil Ambulance untuk mendapatkan perawatan Kesehatan lebih intensif. Tindakan pencegahan kiranya lebih penting kita lakukan dengan serius karena itulah yang sebenarnya kita butuhkan demi kehidupan kita dan semua anggota keluarga menjadi lebih berarti dan lebih baik.

Agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam situasi darurat boleh dipilih untuk meninggalkan hal yang dilarang atau diperintahkan untuk menjaga dan memelihara lima (5) hal yaitu; **agama, jiwa, harta, akal dan keluarga/keturunan**. Selain itu juga bahwa mentaati para ulama' yang sholeh dan pemerintah/**ulil amri** adalah penting selama mereka berpihak kepada kemaslahatan umat Islam.

Kiranya hikmah Nuzulul Qur'an saat pandemik Covid-19 ini sangatlah bermakna karena dampak dari pemahaman spiritual kita kepada ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ditambah

keterangan sejarah para sahabat Nabi SAW akan membawa pemahaman dan pemaknaan yang lebih luas tentang pentingnya arti kesehatan bagi

masa depan umat muslimin.

Di samping itu, bencana global pandemik yang ditimbulkan oleh dampak perubahan iklim itu juga akan membawa umat muslim untuk lebih mengenal model peradaban baru seperti peradaban fasilitas media daring/online. Bukan tanpa cacat bahwa diakui atau tidak bahwa media daring dapat juga menyediakan konten negative yang dampaknya tidak baik bagi generasi muda muslim. Akan tetapi, disamping itu juga bahwa fasilitas media daring/online dapat mempermudah jaringan dakwah dan transmisi pesan kebaikan bagi umat muslim lainnya kepada mereka yang selama ini sangat sulit memperolehnya secara langsung jikalau dapat dikendalikan dan dikemas dengan baik.

Bukankah di dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah SAW kita selalu diperintahkan kepada umat Islam untuk tidak berhenti mengajak dan menyeru kepada nasehat kebenaran dan kebaikan dengan cara-cara yang tepat serta lebih baik. Mencegah yang mungkar dan mengajak melakukan kebaikan dan kebenaran seluas-luasnya/**amar ma'ruf**. Menurut hemat penyusun bahwa itulah makna inti (**core of the core**) dari **Silaturahmi Fitriyyah** di masa pandemik kali ini. Kita berharap agar pandemik Covid-19 InsyaaAllah cepat berlalu dan membawa kebaikan-kebaikan (hikmah) yang tersembunyi di baliknya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat menggambarkan arti dari **silaturahmi fitriyyah** di tengah wabah pandemik Covid-19 ini. **Semoga tulisan ini bermanfaat,,aaamiin..**

(penyunting : Muhammad Idrus, M.Ag, staf Subbag Umum, LPMP NTB)





PENGERTIAN, TUJUAN & MANFAAT

ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN (AKPK) CALON KEPALA SEKOLAH

Oleh :

Drs. Ma Min Shen, M.Pd

Jabatan : Widyaiswara LPMP NTB

Pengertian

AKPK adalah instrumen berbentuk angket yang digunakan untuk memetakan keprofesian calon kepala sekolah/madrasah. AKPK bersifat individual dan merupakan alat refleksi bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

Tujuan Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK)

Tujuan dilakukannya AKPK bagi calon kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

- Untuk mengidentifikasi bagian-bagian kompetensi yang telah dikuasai oleh calon kepala sekolah/madrasah yang ditunjukkan melalui pengetahuan dan pengalamannya. Data ini menunjukkan kekuatan calon kepala sekolah/ madrasah yang bersangkutan;
- Untuk mengidentifikasi bagian-bagian kompetensi yang belum dikuasai oleh calon kepala sekolah/madrasah dan memerlukan pendalaman pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi bagian pengembangan lebih lanjut dalam diklat calon kepala sekolah/madrasah.
- Untuk merumusan program diklat bagi calon kepala sekolah/madrasah.

Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) adalah sebuah *analisis* kebutuhan diklat (*Training Needs Analysis*). Sebuah instrumen untuk mengungkap tingkat penguasaan kompetensi calon kepala sekolah sebelum mengikuti diklat PPCKS. Secara operasional, AKPK adalah sebuah instrumen *Monev Input*, kalau melihat posisinya di dalam komponen-komponen monitoring dan evaluasi sebuah program kegiatan diklat (*Input-Process-Activities-Output-Outcome*). Oleh karena itu, dalam kesejarahan pengembangan diklat PPCKS, AKPK justru yang lebih awal dikembangkan dari pada isi, program maupun *Standar Operating Procedures (SOP)* dari diklat PPCKS itu sendiri.

Bagi peserta diklat PPCKS, analisis kebutuhan diklat adalah faktor penting dalam menjalani masa-masa sulit mengikuti diklat calon kepala sekolah. Analisis kebutuhan belajar peserta adalah sebuah “*jejer*” (barisan) dalam *p e w a y a n g a n* yang memperbincangkan isu-isu terbaru yang nanti akan menggiring jalan cerita selanjutnya. Namun demikian, di sadari juga bahwa kebutuhan belajar peserta tentulah sesuatu yang sangat individual, yang pasti berbeda antara peserta diklat yang satu dengan peserta diklat yang lain. Sebuah upaya *privatisasi* dalam belajar yang akan membantu peserta diklat CKS belajar, mendapatkan pelayanan pelatihan yang ekstensif, mendapatkan *coaching-mentoring* yang

aplikatif, mendapatkan pengalaman belajar yang bernilai, dan akhirnya mendapatkan hasil penilaian diklat yang sangat memuaskan. Sebuah nilai (skor) atau predikat yang mampu merepresentasikan penguasaan kompetensinya. Seberapa bagus kepribadiannya, manajerialnya, kewirausahaannya, supervisi akademiknya, maupun sosialnya.

Bagi penyelenggara diklat PPCKS, kemampuan penyelenggara diklat, Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (LP3CKS) untuk menemukan sebuah pendekatan, metode atau cara yang efektif dan efisien, untuk mendeteksi kebutuhan individu peserta diklat akan menjadi kunci bagi upaya pengembangan kompetensi

calon kepala sekolah. Sebuah data atau informasi yang akan memandu penyiapan program, kurikulum/isi, pola, strategi, pendekatan, metode, bahan pembelajaran, dan penilaian diklat. Pertanyaan pengembangannya adalah : (1) kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh seorang kepala sekolah? ; (2) , bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi individu calon kepala sekolah dan sekelompok calon kepala sekolah? ; (3) bagaimana memfungsikan hasil pemetaan itu sehingga efektif bagi upaya peningkatan kompetensi individu dan kelompok? ; (4) Dan bagaimana mengungkap bukti bukti kegiatan yang menunjukkan bahwa calon kepala sekolah sudah meningkatkan potensi dan kompetensinya.

Begitu signifikan peran Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) dalam pengembangan metode kediklatan calon kepala sekolah/madrasah, maka dalam tahap awal pengembangan program diklat calon kepala sekolah/madrasah, instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah jauh lebih awal dikembangkan dari pada pengembangan program diklat calon kepala sekolah/madrasah itu sendiri. Dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan terus menerus ditingkatkan mutunya, Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) diberikan petunjuk pelaksanaan tersendiri, yakni Petunjuk Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan

Keprofesian Calon Kepala Sekolah/Madrasah.

Instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) dikembangkan oleh LPPKS antara tahun 2009-2011. Dan sampai sekarang belum ada lagi pembaruan (*updating*), revisi, reorientasi, ataupun pengembangan tingkat lanjut dari instrumen AKPK dari sisi substansi, bahasa maupun metodologi. Sebaliknya, selama kurun waktu 2009-2016 dari sisi isi, materi, bahan ajar, silabus diklat (12 modul diklat) sudah diperbarui dua kali (versi 2011 dan versi 2013). Yang terbaru, upaya pengembangan yang dilakukan LPPKS terhadap Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) adalah melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) *On-line*.

Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) *On-line* adalah sebuah upaya untuk meningkatkan operasionalisasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) di lapangan agar lebih efektif dan efisien. Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) *On-line* ini sebenarnya lebih melihat pentingnya perubahan AKPK dari isi operasional. Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) *On-line* dikembangkan untuk kepentingan pemetaan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Aplikasinya dibangun untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data, berupa informasi tentang tingkat penguasaan kompetensi calon kepala sekolah, agar efektif dan efisien menuju terwujudnya pusat data dan informasi kepala-sekolah/madrasah satu pintu di

Indonesia. Aplikasi ini telah disosialisasikan kepada 20 (dua puluh) kabupaten/kota sasaran kegiatan pengumpulan data tahun 2015. Dan sampai sekarang masih terus disosialisasikan ke seluruh kabupaten/kota/provinsi melalui DIPA LPPKS pada setiap tahun anggaran.

Secara keseluruhan Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah dikembangkan dari Permendiknas 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) bagi Calon Kepala Sekolah/Madrasah didasarkan pada lima dimensi kompetensi profesional calon kepala sekolah/madrasah, yaitu: Dimensi Kepribadian, Dimensi Manajerial, Dimensi Kewirausahaan, Dimensi Supervisi, dan Dimensi Sosial. Alur pengembangan instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah digambarkan dalam skema berikut: Instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah yang digunakan sekarang berjumlah 37 item. Dengan sebaran jumlah item per dimensi kompetensi digambarkan dalam skema berikut: Instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) berupa evaluasi diri calon kepala sekolah. Model instrumen adalah pilihan ganda yang terdiri 3 kolom, yakni 1) kolom kesatu berisikan contoh penerapan patokan; 2) kolom kedua berisikan tingkat penilaian kompetensi; dan 3) kolom ketiga berisikan bukti praktik calon kepala sekolah/madrasah. Kolom contoh

penerapan patokan inilah yang diambil dari Permendiknas 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. Kolom penilaian kompetensi adalah tempat dimana calon kepala sekolah/madrasah memberikan

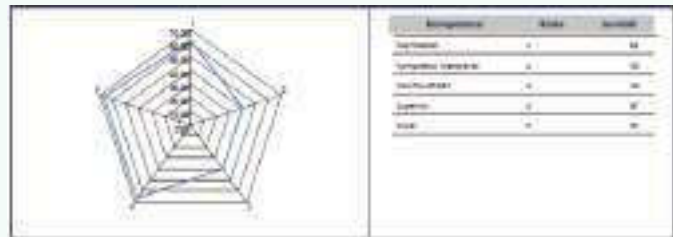
tanda silang pada alfabetikal (A,B,C,D) untuk menentukan pilihannya menurut kondisinya masing-masing. Kolom bukti praktik adalah kolom dimana calon kepala sekolah/madrasah menuliskan informasi/pesan berupa pengetahuan, pemahaman,

wawasan dan pengalaman yang relevan dengan penilaian yang telah diberikan pada setiap indikator contoh penerapan patokan. Pada APKP On-Line bukti kegiatan ini sudah ditiadakan guna kepentingan pengumpulan dan pengolahan data yang lebih efektif dan efisien.

MANFAAT AKPK

Tampilan hasil AKPK

Pada gambar 1 berikut tampak hasil pengolahan AKPK yang menampilkan gambaran kompetensi calon kepala sekolah.



Pada gambar 2 berikut : tampak hasil pengolahan AKPK yang menampilkan diskripsi kompetensi Kepribadian calon kepala sekolah.

1. Kompetensi Kepribadian	
NO	REKAPITULASI
1	1.1. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
2	1.2. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
3	1.3. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
4	1.4. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
5	1.5. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
6	1.6. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
7	1.7. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
8	1.8. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
9	1.9. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.
10	1.10. Memiliki sikap yang baik terhadap orang lain dan mampu berinteraksi dengan orang lain.

Analisis hasil AKPK memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah sebagai berikut.

LPPCKS/M

1. Peta kompetensi awal setiap calon kepala sekolah/madrasah yang telah mengisi AKPK akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun berbagai rancangan diklat bagi mereka agar lebih efektif dan efisien.
2. Hasil AKPK digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan calon kepala sekolah/madrasah dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok belajar dalam kelas berdasar kesamaan kebutuhan pengembangan keprofesiannya.
3. Sebagai dasar untuk menyusun/mengembangkan berbagai instrumen/ perangkat diklat, seperti: struktur program, kurikulum/silabus, bahan diklat, sumber belajar, alat pembelajaran, alat penilaian dan lain-lain

D i n a s Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Provinsi/ Kabupaten/ Kota

1. A K P K digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pembinaan calon kepala sekolah/ madrasah berkelanjutan.

2. Sebagai dasar penyusunan program dan anggaran untuk program penyiapan kepala sekolah/ madrasah.

Fasilitator Diklat.

1. Untuk menentukan keluasan dan kedalaman materi diklat.

.2 Sebagai dasar menentukan strategi dan pendekatan pembelajaran.

Calon Kepala Calon Sekolah /Madrasah

1. Sebagai bahan refleksi diri untuk

menentukan skala prioritas dalam pengembangan diri menuju pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/ madrasah paripurna secara berkelanjutan.

2. Sebagai dasar melakukan persiapan diri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.

Mengingat begitu strategisnya penggunaan hasil AKPK bagi calon KS perlu dioptimalkan pemahaman tentang AKPK dan tata cara pengisiannya, antara lain dengan :

1. Pemberian pemahaman yang benar tentang AKPK bagi calon KS, Dinas Pendidikan

Kajian Utama

Kab./Kota serta Dinas Pendidikan Provinsi, dan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD)

2. Perlunya kejujuran di dalam pengisian instrument AKPK oleh Calon Kepala Sekolah

Sedangkan dalam pelatihan diklat In On In, perlu di perhatikan :

1. Sikap mau menerima apa adanya terhadap hasil AKPK sehingga RTK dapat memberi perubahan yang diharapkan lebih nyata.
2. Harus ada sikap kekonsistenan terhadap tindakan dalam Rencana

- Tindak Kepemimpinan dengan hasil AKPK
3. Diperlukannya pengukuran terhadap hasil RTK yang terkait dengan peningkatan AKPK lemah.

Daftar Pustaka

Sumber :

1. LPPKS. 2013. *Petunjuk Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) Calon Kepala Sekolah/Madrasah*. LPPKS: Karanganyar
2. Mendiknas. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*, Mendiknas : Jakarta
3. lppks.kemdikbud.go.id/id/kabar/analisis-kebutuhan-pengembangan-keprofesian-akpk-dalam-diklat-ppcks





KEMITRAAN LPMP NTB DENGAN DINAS DIKBUD PROVINSI NTB

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) yang semakin eksis membangun Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata

Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipropinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi: 1). Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah; 2). Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; 3). Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan; 4). Fasilitasi

peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; 5). Pelaksanaan kerjasama dibidang penjaminan mutu pendidikan; 6). Pelaksanaan urusan administrasi LPMP. Dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan

dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah, Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menyebutkan Kompetensi Pengawas Sekolah adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Pengawas Sekolah yang profesional harus menguasai 6 (enam) kompetensi sebagai seorang pengawas, Kepala Sekolah harus menguasai 5 (lima) kompetensi, sedangkan Guru harus menguasai 4 (empat) kompetensi.

Salah satu fungsi LPMP adalah Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan. Pelaksanaan Kerja Sama Penjaminan Mutu Pendidikan pada LPMP NTB bisa dilakukan melalui Seksi Sistem Informasi (SI), Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP), maupun Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS). Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan salah satunya adalah melalui Seleksi Calon Pengawas Sekolah. Seleksi Calon Pengawas Sekolah baik jenjang Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah telah dilakukan Seleksi Substansi maupun Diklat

Calon Pengawas Sekolah. LPMP NTB telah menjalin Kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terkait dengan Calon Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Menengah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa terkait dengan Calon Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Dasar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada tahun 2018 telah menjalin Kemitraan dengan LPMP NTB dalam rekrutmen Calon Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Menengah. Karena ada berbagai Kebijakan Regulasi terkait dengan Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah, Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2018 belum bisa dikeluarkan sertifikat kelulusannya pada tahun tersebut. Dengan berbagai usaha dan upaya sehingga pada tanggal 8 Januari 2020 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Sertifikat Kelulusan Calon Pengawas Sekolah Jenjang Dikmen sudah diserahkan dari Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (Kasi PMS) kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikbud Prop. NTB Dr. H. Aidy Furkan, M.Pd. menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen LPMP NTB yang telah memfasilitasi kegiatan Seleksi Calon Pengawas

mulai dari Seleksi Substansi sampai dengan Pendidikan dan Pelatihan Cawas, semoga ditahun-tahun yang akan datang Kemitraan ini bisa berlanjut dalam kerangka Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi NTB. Sertifikat Calon Pengawas Sekolah yang telah Lolos akan segera diberikan kepada yang berhak dan untuk Tahap kedua ini yang dinyatakan lolos sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang, dari 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdaftar. Ditempat terpisah Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (Kasi PMS) LPMP NTB Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. memberikan apresiasi dan attensi setinggi tingginya kepada Dinas Dikbud Prov. NTB yang telah mempercayakan LPMP NTB dalam Rekrutmem Calon Pengawas Sekolah untuk jenjang Pendidikan Menengah.

Salah satu peserta Calon Pengawas Sekolah Himdani Farmala, S.Pd., M.Pd. Guru Madya SMAN 1 Sakra Timur memanjatkan puji syukur dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan LPMP NTB yang telah berhasil sehingga Sertifikat Cawas Sekolah yang ditunggu-tunggu selama satu tahun lebih, bisa diberikan kepada yang berhak. Kami sangat setuju dilaksanakannya Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah ini. Kami yakin dengan Rekrutmen ini akan dilahirkan Pengawas-pengawas Sekolah yang professional sehingga peningkatan mutu pendidikan akan

cepat bisa tercapai melalui peran Pengawas Sekolah dalam melaksanakan Supervisi Mutu Pendidikan.

Oleh : IMMA
2020





INTERNALISASI ZI-WBK Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB

Setiap bulan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) menggelar kegiatan Kerohanian/Imtaq dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini juga sejalan dengan Program LPMP NTB dalam menginternalisasikan Pembangunan **Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)**. Warga LPMP NTB yang beragama Hindu yang telah membentuk Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB juga menggelar kegiatan kerohanian/imtaq. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 mengambil Tema “ Dengan Makna Hari Raya Siwalatri Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Umat Hindu”. Tema ini diambil dalam rangka menyongsong Hari Raya Siwalatri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020. Dengan Hari Raya Siwalatri kita tingkatkan Kualitas Umat Hindu dalam kerangka Implementasi Program Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

Dharma Wacana Siraman Rohani/Imtaq Ikatan Keluarga Hindu

(IKH) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat disampaikan oleh Narasumber Drs. Ketut Lestra. Sesuai dengan Tema yang disampaikan yaitu “Dengan Makna Hari Raya Siwalatri Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Umat Hindu”.

Intisari dari siraman kerohanian ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup umat Hindu melalui perubahan diri sendiri sebelum mengubah orang lain. Mengubah orang lain sangatlah mudah, tetapi mengubah diri sendiri sangat sulit. Sebenarnya kita semua adalah Agen perubahan (*Agent of Change*). Mulai kapan kita mengubah diri kita? Tentu mulai dari sekarang, tidak harus menunggu hari esok, ataupun lusa. Makin cepat semakin bagus. Dan perubahan itu mulai dari hal hal yang kecil. Perubahan yang besar merupakan akumulasi dari perubahan-perubahan yang kecil.

Siwaratri artinya malam Siwa. Jika diuraikan terdiri dari 2 kata, yaitu Siwa dan Ratri. Siwa dalam bahasa Sansekerta berarti baik hati, suka memaafkan, memberi harapan dan membahagiakan dan juga Siwa dapat diartikan sebagai sebuah gelar

atau nama kehormatan untuk salah satu manifestasi Tuhan yang diberi nama atau gelar kehormatan Dewa Siwa, dalam fungsi beliau sebagai pemerelina untuk mencapai kesucian atau kesadaran diri yang memberikan harapan untuk kebahagiaan.

Sedangkan Ratri artinya malam, yang dapat diartikan juga sebagai kegelapan. Jadi Siwaratri dapat diartikan sebagai malam pemerilina atau pelebur kegelapan dalam diri dan hati untuk menuju jalan yang lebih terang.

Dalam memaknai Hari Raya Siwaratri tidak sedikit yang beranggapan bahwa Siwaratri bertujuan untuk melebur dosa. Benarkah demikian? Lantas bagaimana dengan adanya Hukum Karma Phala? Jika dosa bisa dilebur hanya dalam satu malam (Siwaratri). Menurut pengamat agama Gusti Ketut Widana mengatakan, secara tatwa sesungguhnya Siwaratri merupakan malam perenungan dosa, (bukan peleburan dosa), dengan tujuan tercapainya kesadaran diri. “Secara tatwa, sesungguhnya Siwaratri itu

simbolisasi dan aktualisasi diri dalam melakukan pendakian spiritual guna tercapainya 'penyatuan' Siwa, yaitu bersatunya atman dengan paramaatman atau Tuhan penguasajagatraya itu sendiri.

Sebagai malam perenungan, kita mestinya melakukan evaluasi atau introspeksi diri atas perbuatan-perbuatan selama ini. Pada malam pemujaan Siwa ini kita memohon diberi tuntunan agar dapat keluar dari perbuatan dosa. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Siwalatri adalah:

Monabrata atau berdiam diri dan tak berbicara. Pelaksanaannya dilangsungkan di pagi hari dan dilakukan selama 12 jam tepatnya dari jam 06.00 – 18.00. **Mejagra** atau tidak tidur selama semalaman. Pelaksanaannya berlangsung dari pagi sampai pagi hari di keesokan harinya yang dilakukan selama 36 jam dari jam 06.00 – 18.00 di keesokan harinya.

Upawasa atau tidak makan dan tidak minum. Puasa ini dilakukan selama 24 jam dari jam 06.00 – 06.00. Apabila sudah 12 jam maka diperbolehkan untuk makan dan minum dengan syarat bahwa nasi yang dimakan ialah nasi putih dengan garam dan minum air putih (air tawar

tanpa gula).

Dalam Agama Hindu selalu ada tingkatan Nista, Madya dan Utama yang bisa dipilih sesuai kemampuan, begitu pula dalam melaksanakan Siwaratri.

Tingkat Utama, melaksanakan : **Monabrata, Mejagra, Upawasa**
Tingkat Madya (sedang), melaksanakan : **Mejagra, Upawasa**

Tingkat Nista (rendah), melaksanakan : **Mejagra**

Dalam menjalankan kegiatan Siwaratri diakhiri dengan melakukan persembahyangan dan memohon kepada Sang Hyang Siwa/Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan berkah dan ampunan, dan juga dikembalikan menjadi manusia yang suci dan paripurna serta memohon ditunjukkan jalan terang agar terhindar dari perbuatan dosa.

Jadi dapat disimpulkan bawah Hari Raya Siwaratri bukanlah hari penebusan dosa melainkan perenungan dosa yang selama ini telah kita perbuat. Hukum Karmaphala tetap akan berlaku, akan tetapi diyakini dengan menjalankan Brata Siwaratri niscaya kedepannya kita akan mampu mengendalikan diri sehingga dapat terhindar dari

perbuatan dosa.

Pada kesempatan itu Ketua Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB juga sebagai Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengucapkan : Selamat Hari Raya Siwalatri “ semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan kesuksesan buat kita semua. Dengan Hari Raya Siwalatri Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB menginternalisasikan Program Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) didalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui kekurangan-kekurangan yang dimiliki kita akan bisa memperbaiki diri sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari hari kehari akan semakin paripurna. Introspeksi diri/perenungan dosa sangat penting dilakukan seiring dengan pelaksanaan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Oleh : IMMA 2020





LPMP NTB SELANGKAH LEBIH MAJU DALAM MENSUKSESKAN GERAKAN ZERO WASTE

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi sampah plastik, dengan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran untuk mensukseskan dan memerangi sampah. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tertanggal 26 November 2019 Tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum berbahan plastik sekali pakai dan/ kantong plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan Gerakan Zero Waste dapat menghasilkkan insan yang peduli lingkungan. Lingkungan bebas sampah plastic merupakan dambaan seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali masyarakat

Indonesia. Memerangi sampah plastik adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Indonesia masuk sebagai negara dengan pembuangan sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Demikian rilis Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI, Agus Haryono beberapa waktu lalu. Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan antara lain : 1). Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti: piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, dan/ atau kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing; 2). Di dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus

makanan / kecemasan mmuman plastik; 3). Menyediakan dispenser dan/ atau teko air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuany ruang rapat/aula; 4). Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca, melamin, keramik, dan rotan antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/ *tumbler* sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi; 5). Meningkatkan penggunaan kantong yang dapat digunakan kembali (*reusable bag*) dalam aktivitas jual beli di area kantin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6). Mengurangi penggunaan spanduk, *backdrop*, baliho, dan media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat,

sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya; 7). Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2019, menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mengatakan bahwa LPMP NTB selangkah lebih maju. Hal ini dapat dilihat, saat apel pagi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Pihak Manajemen telah secara simbolis membagikan Botol tempat air minum dan Lepekan/piring untuk tempat snack kepada karyawan dan

karyawati. Hal ini dilakukan dalam kerangka mengurangi penggunaan plastik di masyarakat secara umum ataupun di instansi pemerintah secara khusus. Sehingga gerakan Zero Waste secara bertahap akan menunjukkan hasil yang signifikan. Kita semua diharapkan peduli dengan lingkungan.

Oleh : IMMA 2020



KERJA BAKTI KEBERSIHAN YANG DI LAKUKAN LPMP NTB



PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZI-WBK PADA LPMP NTB

Sebagai tindak lanjut dari Pencanangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Zone Integritas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 09 Agustus 2017 ddi Savana Hotel Convention, Malang Jawa Timur, dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi. Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), mengamanatkan bahwa seluruh Institusi harus melaksanakan Reformasi Birokrasi sehingga Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN) tidak terjadi lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. KKN harus diberantas sehingga pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal. Untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan ZI-WBK perlu dibentuk suatu Tim Pembangunan ZI-WBK pada LPMP NTB. Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK dilingkungan LPMP NTB

dilakukan melalui suatu mekanisme, sehingga Tim yang terbentuk akan bekerja secara Profesional, Mandiri dan Santun. Anggota Tim yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria antara lain sebagai berikut : 1) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan LPMP NTB; 2) Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 3) Kualifikasi Pendidikan minimal S1; 4) Sehat Jasmani dan Rohani; 5) Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidang Tugas dalam Tim Mekanisme Penunjukan Tim Pembangunan ZI-WBK di lingkungan LPMP NTB sebagai berikut : 1) Kasubbag Umum membuat kriteria Tim ZI-WBK; 2) Kasubbag Umum mengidentifikasi jumlah dan Kualifikasi Kebutuhan TIM Pembangunan ZI-WBK; 3) Kasubbag umum mengusulkan Tim sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan kepada Kepala LPMP NTB; 4) Kepala LPMP NTB memeriksa dan mendisposisikan Usulan TIM kepada Kasubbag Umum untuk membuat Draf SK Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK sesuai dengan usulan yang telah disetujui. Apabila tidak disetujui Kasubbag Umum akan membuat usulan baru kepada Kepala LPMP NTB; 5) Kasubbag Umum membuat Draf SK Tim Kerja untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan Kepala LPMP NTB; 6) Kepala LPMP NTB menetapkan dan menandatangani dalam bentuk Surat Keputusan serta menyerahkan kepada Kasubbag Umum untuk diteruskan kepada Anggota Tim Kerja yang telah ditetapkan; 7) Kasubbag Umum menyerahkan SK Tim Pembangunan ZI-WBK kepada

Pengadministrasian Umum untuk disimpan sebagai arsip. Tugas Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah sebagai berikut : 1) Merencanakan Program Kerja ZI-WBK; 2) Merancang jadwal pelaksanaan kerja Tim ZI-WBK; 3) Membangun Koordinasi, Evaluasi, dan Pengawasan yang efektif pada masing-masing magian untuk mempercepat Pembangunan ZI-WBK di lingkungan LPMP NTB; 4) Memberikan dukungan pada setiap bagian di lingkungan LPMP NTB untuk menuju WBK; 5) Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap keseluruhan aktifitas; 6) Mengadministrasikan Hasil Kerja TIM; 7) Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala LPMP NTB.

Tim Kerja Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan LPMP NTB tahun 2020 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang, masing-masing anggota Tim terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala LPMP NTB), Ketua (Kasi PMS), Koordinator Manajemen Perubahan (Kasubbag Umum), Koordinator Penataan Tatalaksana, Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM, Koordinator Penguatan Akuntabilitas, Koordinator Penguatan Pengawasan (Kasi FPMP), Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Kasi SI), dan Koordinator Kesekretariatan dan masing-masing dilengkapi dengan anggota-anggota.

Pada saat penyerahan SK Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK Kepala LPMP NTB Mohamad

Mustari, Ph.D. menyampaikan ucapan terima kasih atas terbentuknya Tim ini dan selamat melaksanakan tugas semoga Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada LPMP NTB dapat segera terwujud sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas atas Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pegawai LPMP NTB. Mari kita wujudkan ZI-WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Reformasi Birokrasi yang telah digulirkan oleh Pemerintah sangat diapresiasi oleh seluruh masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit, efisien, efektif, transparan, lebih mudah, dan akuntabel

Salah satu anggota Tim Pembangunan ZI-WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. yang ditunjuk sebagai Ketua mengucapkan terima kasih kepada semua komponen LPMP NTB yang telah mempercayai untuk mengawal ZI-WBK. Dengan kerendahan hati, beliau menyampaikan kami dan Tim tidak akan bisa bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari Pimpinan lembaga dan komitmen bersama untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsekuen dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Kami dan seluruh Tim akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita berdoa dan berharap semoga LPMP NTB tahun 2020 mendapat Piagam Penghargaan sebagai Instansi yang berpredikat "WBK".

Oleh : IMMA 2020

ZI WBK
Melayani Sepenuh Hati

KEMITRAAN DINAS DIKBUD KABUPATEN SUMBAWA DENGAN LPMP NTB

Dengan dikeluarkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor: 1.01.1.01.01.20.14 tentang Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Kelompok Pengawas, Penilik, Tenaga Kependidikan dan

Kebudayaan Tahun 2020. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) Kabupaten Sumbawa melalui Surat Tugas Nomor : 829/0023/Dikbud/2020 Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa telah menugaskan Lili Rohana, A.Md melakukan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB). KIS yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai pada tanggal 23 sampai dengan 24 Januari 2020.

Menurut Lili Rohana, A.Md. “Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) yang dilakukan bertujuan untuk Memverifikasi dan Memvalidasi Data Diklat Calon Pengawas Sekolah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, dalam rangka menindaklanjuti MoU yang telah dilakukan antara Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa dengan LPMP NTB



ditahun 2019, terkait Seleksi Calon Pengawas Sekolah (Cawas) Jenjang Pendidikan Dasar “. Seleksi Calon Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan tahun 2019 telah meloloskan Cawas sebanyak 14 (empat belas) orang dari 15 (lima belas) orang yang mengikuti seleksi Cawas. Semoga Seleksi Cawas tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar“.

Koordinasi Sinkronisasi Integrasi (KIS) Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa dengan LPMP NTB diterima oleh Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi sekaligus sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kemitraan terkait dengan Pengawas Sekolah dari jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Jenjang Pendidikan Menengah. Untuk tahun 2018 LPMP NTB telah menjalin Kemitraan dengan Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk melaksanakan Seleksi Cawas jenjang Pendidikan Menengah, mulai dari Seleksi Substansi sampai dengan Diklat Cawas. Untuk Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga melakukan Kemitraan Seleksi

Cawas. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah dan

Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Pengawas Sekolah. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Sekolah yang Profesional harus dilakukan dengan melalui Seleksi, mulai dari Seleksi Administrasi, Seleksi Substansi sampai dengan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah.

Terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Cawas dilakukan oleh Pengelola Kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah LPMP NTB Lale Srilastatun, S.Sos., MM (Analisis Mutu Pendidikan). Beliau menyampaikan “Ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dalam kerangka menghasilkan Pengawas yang Profesional. Tugas Pengawas Sekolah kedepan sebagai Supervisor Mutu Pendidikan sangat berat, karena Pengawas Sekolah menjadi Motor Penggerak Kemajuan Dunia Pendidikan“
Oleh: IMMA 2020



EVALUASI PROGRAM 2019 & PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN ZI-WBK 2020



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 perubahan atas Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja, Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zone integritas.

Ada 4 (empat) program yang ditetapkan Kemen-PAN dan RB untuk dijalankan dalam Program Kerja Manajemen Perubahan yang terdiri dari : 1) Menyusun Tim Kerja; 2) Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK; 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi; 4) Melakukan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Terkait dengan Program Kerja Manajemen Perubahan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat melaksanakan "Evaluasi Program 2019 dan Penyusunan Program Pembangunan ZI-WBK 2020". Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimulai tanggal 3-4 Februari 2020 diikuti oleh Tim Pembangunan ZI-WBK

berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang.

Adapun materi yang didiskusikan dalam kegiatan ini adalah : 1) Pengendalian Gratifikasi; 2) Target dan langkah Pembangunan WBK; 3) Evaluasi Program Pembangunan WBK tahun 2019 melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE); 4) Penyusunan Program Pembangunan WBK tahun 2020.

Evaluasi Program 2019 dan Penyusunan Program Pembangunan ZI-WBK tahun 2019 bertujuan untuk melihat program yang telah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, kendala/hambatan/permasalahan serta solusi tahun 2019 dan Program Pembangunan ZI-WBK yang akan dilaksanakan tahun 2020 sehingga Pembangunan WBK LPMP NTB dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam Reformasi Birokrasi. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK telah disusun; 2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan

tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK; 3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK. pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Kegiatan ini difasilitasi oleh Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. yang juga sebagai penanggungjawab kegiatan Evaluasi Program 2019 dan Penyusunan Program Pembangunan ZI-WBK 2020 mengatakan bahwa dalam membangun Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) "Komitmen Pimpinan dan Pegawai/staff memegang peranan yang sangat penting dalam program Reformasi Birokrasi. Tanpa adanya Komitmen antara Pimpinan dan Pegawai/staff, Pembangunan ZI-WBK ini akan berjalan tertatih-tatih. Untuk itulah Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) sangat strategis perannya dalam kerangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi. Marilah kita bersama-sama mereformasi diri sendiri sebelum mereformasi orang lain. Mulai dari yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Masing-masing Tim Pengungkit mulai dari Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Peningkatan Mutu Pelayanan Publik semuanya harus berkolaborasi sehingga hasil dari Reformasi Birokrasi akan cepat bisa dirasakan oleh Stakeholder atau masyarakat pada umumnya." Motto ZI-WBK LPMP NTB adalah : "Melayani Sepenuh Hati", tutup Made.
Oleh : IMMA 2020



JUMAT BERSIH

Percepat Derap Langkah LPMP NTB Menuju WBK



Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Sejak tahun 2017 LPMP NTB sudah mulai melakukan Pencanangan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), dengan demikian Wilayah Bebas dari Korupsi bisa cepat terwujud. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat setiap bulan mempunyai program Jumat Bersih, yang dilakukan oleh seluruh warga LPMP NTB mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan

Tenaga *Outsourcing*.

Program "Jumat Bersih" yang dilaksanakan setiap bulan oleh LPMP NTB dalam rangka menciptakan kebersihan yang optimal, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM)/pegawai yang ada berkinerja tinggi.

Kebersihan dilakukan baik dalam ruangan maupun diluar ruangan. Gerakan kebersihan selaras dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 "Melarang Penggunaan Kemasan Plastik", begitu juga dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan gerakan Zero Wastanya. Seiring dengan itu pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 seluruh pegawai LPMP NTB melakukan gerakan "Peduli Lingkungan"han. Gerakan kebersihan dilaksanakan antara lain:

Satuan - satuan kerja yang berminat untuk diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) membutuhkan pengetahuan tentang Strategi jitu menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK). Strategi yang baik bukan merupakan jalan pintas atau potong kompas yang mungkin bisa membuat satuan kerja memperoleh predikat Wilayah dari Korupsi (WBK), tetapi hal tersebut menjadi semu (*artificial*). Strategi Menuju WBK sangat penting perannya dalam rangka mempercepat proses pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Salah satu Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah "Penampilan Fisik Kantor Prima dengan Kebersihan yang Optimal".

Kesan pertama terbentuk dari melihat penampilan fisik kantor. Apabila Kantor menunjukkan penampilan yang menarik dan bersih, maka kesan pertamanya akan baik, demikian pula sebaliknya. Penampilan fisik kantor yang bersih harus mencakup keseluruhan mulai dari halaman sampai dengan kamar kecil (*toilet*). Penampilan kantor yang bersih mencerminkan perilaku penghuni kantor yang sangat berkomitmen tinggi pada kenyamanan dan keindahan demi menunjang produktifitas kerja tinggi. Hal ini sangat diperlukan dalam pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga melakukan

1. Halaman Kantor dan Parkir.
Dengan menerapkan konsep kantor hijau, maka kebersihan kantor sangat diutamakan. Halaman kantor sangat berpotensi menimbulkan kesan pertama bagi pengunjung tentang kemungkinan citra kantor tersebut. Apabila halaman kantor bersih, maka pengunjung mungkin akan mempunyai kesan positif terhadap citra kantor dan perilaku pegawainya, demikian pula sebaliknya.
2. Area Ruang Tamu Utama (*Lobby*)
Pengunjung yang merasa nyaman di lobby dipastikan akan betah berlama-lama di kantor satuan kerja. Area *Lobby* mencerminkan perilaku tuan rumah. Pengunjung merasakan Atmosfir kemurahan hati tuan rumah atau kesempitan hatinya.
3. Ruang Penerima Tamu
Pada prinsipnya pengelolaan ruang tamu tidak jauh berbeda dengan area *lobby*. Keramahan dan kebersihan menjadi faktor kunci yang sangat penting bagi pelayanan tamu.
4. Ruang Kerja Pimpinan
Pimpinan harus memberikan keteladanan/ccontoh kepada pegawai tentang kebersihan. Pegawai tidak mungkin bisa menerapkan perilaku bersih bila pimpinannya tidak mencontohkan bagaimana perilaku yang bersih tersebut.
5. Ruang Kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) citranya sebagai aparatur pemerintah membuat masyarakat berharap memperoleh layanan terbaik. Harapan ini akan berkesan melihat ruang kerja pegawai bersih. Ruang kerja yang bersih akan berpengaruh pada produktifitas pegawai.
6. Ruang Unit Layanan Terpadu (ULT)
Dengan ketersediaan ruang ULT, maka pegawai dapat fokus dalam bekerja di ruang

kerjanya masing-masing, sedangkan pelayanan diberikan di ruang ULT. Kebersihan ULT perlu dijaga sehingga pengunjung merasa nyaman dan akan betah menerima pelayanan.

7. Ruang Rapat
Kegiatan rapat adalah jantungnya organisasi. Dalam hal ini ruang rapat yang bersih sangat penting mendukung berjalannya rapat yang baik. Kebersihan ruang rapat sangat berpengaruh pada rasa nyaman peserta rapat yang berdampak pada munculnya gagasan-gagasan kreatif dan inovatif sehingga akhirnya akan menghasilkan keputusan yang baik.
8. Ruang Kantin
Tempat makan pegawai sangat penting dalam fasilitas kantor. Pegawai membutuhkan makanan sehat bergizi demi menunjang produktifitas kerjanya.
9. Ruang Ibadah
Tempat ibadah yang bersih sangat menunjang terwujudnya kesehatan rohani pegawai. Sumber kekuatan pegawai tidak hanya di kantor fisik, tetapi juga berasal dari kejiwaan yang terbina melalui kegiatan ibadah.
10. Kamar Kecil
Kebersihan kamar kecil sangat penting. Banyak

kalangan masyarakat yang bila berkunjung kesuatu tempat langsung menuju kamar kecil. Masyarakat berkunjung ke kamar kecil bukan saja sekedar membuang hajatnya, tetapi sekedar menilai sejauh mana perilaku kebersihan penghuni satuan kerja. Kamar kecil yang bersih maka besarlah harapan masyarakat memperoleh layanan yang baik

Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. selaku Pembina Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP NTB, memberikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah peduli akan kebersihan lingkungan. Penampilan kantor yang bersih mencerminkan perilaku penghuni kantor yang sangat berkomitmen tinggi pada kenyamanan dan keindahan demi menunjang produktifitas kerja yang tinggi, dan pada akhirnya akan bermuara dalam pemberian "Pelayanan Prima" kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dalam menunjang pembangunan ZI-WBK. "Jumat Bersih Percepat Derap Langkah LPMP NTB menuju WBK", pungkas Mustari.

Oleh : IMMA 2020



GALERI KEGIATAN

JALAN SEHAT & SENAM KESEGGARAN





MELALUI MCU Tingkatkan Pelayanan Publik Bermutu

Ujung tombak pelayanan publik tidak hanya terletak pada kelengkapan sarana dan prasarana dan kecanggihan teknologi informasi tetapi yang lebih utama dari itu semua adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya, berintegritas, dan berjiwa melayani. Pelayanan publik yang bermutu sangat tergantung pada SDM penyedia layanan. Pegawai satuan kerja (satker) seyogyanya memenuhi aspek kesehatan jiwa dan raga. Begitu juga Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat jasmani dan rohani. Penampilan fisik yang sehat dan bugar merupakan salah satu Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kesehatan pegawai harus diperiksa secara berkala dan berkesimbangan oleh dokter. Pegawai harus bebas dari ancaman penyakit yang bisa datang

menyerang secara tiba-tiba seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan *stroke*. Oleh karena itu pegawai harus diperiksa profil darahnya sehingga bisa menjaga kadar lemak darah (kolesterol) dan asam urat tetap pada ukuran yang wajar dan tidak berlebihan. Pegawai juga perlu diperiksa irama jantungnya agar dapat diketahui dengan segera bila ada kejanggalan dalam detak jantungnya. Selanjutnya juga perlu dilakukan pemeriksaan kadar gula dalam tubuh agar dapat mendeteksi potensi penyakit kencing manis (diabetes). Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap mata, gigi, dan telinga. Apabila semua indikator kesehatan pegawai berada dalam kadar yang aman, enunjukkan kinerja yang produktif dan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai juga diberikan vitamin yang perlu diminum sebagai suplemen tambahan.

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan pegawai, dengan Surat Pengumuman dari Kepala LPMP NTB Nomor 217/C7.47/TU/2020 tertanggal 4 Februari 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan rutin kesehatan *Medical Check Up (MCU)*. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) setiap tahun telah memprogramkan kegiatan tersebut. Tahun 2020 ini pemeriksaan kesehatan rutin dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Februari 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pemeriksaan Kesehatan Rutin ini dimulai pukul 08.00 sampai selesai diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan LPMP NTB berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Pengambilan hasil pemeriksaan *Medical Check Up (MCU)* sudah bisa diambil dari tanggal 2-4 Maret

maka pegawai diharapkan bisa m 2020 dan bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter terkait sehingga penyakit yang diketahui cepat ditangani. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. mengatakan salah satu Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah “Penampilan Fisik Pegawai yang Sehat dan Bugar “. Untuk mewujudkan Penampilan Fisik Pegawai yang Sehat dan Bugar pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun sangat penting dilakukan. Kami berharap semoga semua pegawai LPMP NTB yang telah melakukan *Medical Chek Up (MCU)* hasilnya sehat-sehat dan kesehatan pegawai berada dalam kadar yang aman sehingga pegawai diharapkan mempunyai kinerja yang produktif dan prima. Dengan Kinerja yang produktif dan prima, pegawai LPMP NTB akan bisa memberikan Pelayanan Prima kepada semua *Stakeholder* baik

internal maupun eksternal sesuai dengan Motto ZI-WBK “ Melayani Sepenuh Hati“, tutup Mustari.

Menurut salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) LPMP NTB yang sedang mengikuti *Medical Chek Up (MCU)* ini, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. memberikan apresiasi, attensi, penghargaan, dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala LPMP NTB yang telah menyelenggarakan program seperti ini. Program ini sangat penting karena Pegawai yang sehat dan bugar diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang produktif dan prima. Ujung tombak pelayanan publik yang bermutu ditentukan oleh Sumber Daya Manusianya. Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan Reformasi Birokrasi Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), dimana masyarakat mengharapkan diberikan Pelayanan Prima oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). “ Melalui *Medical Chek Up*



(MCU) Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Bermutu“, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB KOMITMEN WUJUDKAN PREDIKAT ZI-WBK

Kegiatan Internalisasi Terhadap pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) yang dilaksanakan oleh Tim ZI-WBK LPMP NTB yang di ketuai oleh Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd, Selasa (9/6/2020) pukul 10.00 s.d 12.30 Wita.

Kegiatan Internalisasi Terhadap pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dibuka oleh Kepala LPMP NTB Mohamad Mustari, Ph.D yang dihadiri oleh seluruh ASN dan PPNPN LPMP NTB. Beliau dalam pengarahannya menyampaikan, “mengapresiasi seluruh warga LPMP NTB atas usaha maksimal

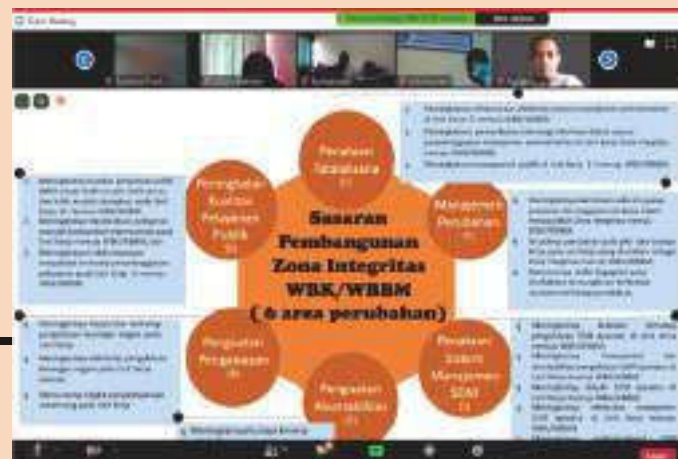
sehingga LPMP NTB dapat diusulkan sebagai calon Penerima Predikat ZI-WBK yang pada tahun 2019 gagal meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. melakukan reformasi birokrasi serta melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat memberikan layanan dengan lebih baik,” harapnya.

Kegiatan internalisasi ZI-WBK bertujuan untuk mengevaluasi kegagalan dalam meraih WBK untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.

Selanjutnya penyampaian informasi oleh ketua Tim ZI-WBK LPMP NTB yang menekankan pada

peningkatan nilai Komponen pengungkit serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pecegahan korupsi agar persepsi steacholder terhadap LPMP NTB menjadi lebih baik.

Untuk menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi harus merupakan komitmen bersama seluruh komponen di LPMP NTB. (PIK)





LPMP NTB MENGAWAL 4746 SEKOLAH DALAM SUPERVISI

Supervisi Mutu Pendidikan adalah proses mengawal peningkatan mutu pendidikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bersama dengan Pengawas Sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah antara lain : 1. Evaluasi permasalahan capaian mutu, 2. Pendampingan penyusunan rencana peningkatan mutu, 3. Pendampingan peningkatan mutu, dan 4. Monitoring dan evaluasi. Keberhasilan seorang pengawas sekolah dalam melaksanakan Supervisi Mutu pendidikan disekolah terutama sekolah binaannya, ada bebarapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai acuan yaitu : sekolah mampu dan berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sekolah mempunyai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), sekolah mempunyai program peningkatan mutu yang terukur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan

sekolah memiliki budaya mutu. Hasil Analisis Supervisi Mutu Pendidikan ini akan didesiminasikan kepada *Stakeholder* atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan rekomendasi yang dihasilkan dari Analisis Supervisi Mutu Pendidikan ini setiap kabupaten/kota akan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sekolah sehingga akan lebih mudah dicarikan solusi pemecahannya termasuk program dan kegiatan serta penyiapan penganggarannya.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pencapaian

tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan sumberdaya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Pengawas Sekolah sebagai salah satu sumberdaya pendidikan mempunyai tugas melaksanakan supervisi manajerial, supervisi akademik dan evaluasi pendidikan pada satuan pendidikan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016, Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Tugas pokok Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan meliputi : penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Supervisi Mutu Pendidikan adalah proses mengawal peningkatan mutu pendidikan oleh LPMP bersama dengan Pengawas Sekolah. Hasil Supervisi Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah perlu ditindaklanjuti agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi profesionalisme guru untuk manajemen kelas dan Kepala Sekolah untuk manajemen sekolah. Dampak nyata ini dapat dirasakan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Peserta didik, serta sekolah pada umumnya. Hasil dari Supervisi Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pengawas sekolah perlu diketahui oleh Guru, Kepala Sekolah, Pemerintah Daerah

dan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang peduli dengan pendidikan.

Satuan pendidikan yang akan disupervisi dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) tahun 2020 sebanyak 4746 (empat ribu tujuh ratus empat puluh enam) satuan pendidikan/sekolah. Sekolah yang akan dilakukan Supervisi Mutu Pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rincian kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan adalah : 1) Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan; 2) Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas Sekolah; 3) Supervisi Satuan Pendidikan; 4) Analisis Supervisi Mutu Pendidikan; 5) Diseminasi dan Evaluasi Hasil Supervisi.

Menurut salah satu Penanggungjawab Kegiatan, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd mengatakan melalui Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan

diharapkan pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Nusa Tenggara Barat akan cepat terwujud dalam rangka Membangun NTB Gemilang. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sejatinya bertujuan untuk Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Pengawasan yang dilakukan oleh LPMP NTB bersama dengan Pengawas Sekolah dalam Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan, kami berharap tahun 2024 seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu terus ditingkatkan. Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. “ Bersama Menjamin Mutu Mewujudkan NTB Gemilang”, pungkas Made.

Oleh: IMMA 2020



PERAN SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM MEMBANGUN ZI-WBK

TOLAK GRATIFIKASI = KORUPSI

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dilingkungan Kementerian dan Kebudayaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Disamping program Penataan Sumber Daya Manusia (SDM), Program Penguatan Pengawasan memiliki prosentase sangat signifikan dalam

komponen pengungkit yaitu 15%. Pengawasan harus diperkuat demi menjamin tercapainya sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Di level Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan di level satuan kerja dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Pengawasan dilakukan dengan cara audit, konsultasi, dan penjaminan mutu.

Berdasarkan fakta dan data yang ada, kinerja Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud dua tahun terakhir mengalami penurunan. Buktinya, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemendikbud Tahun 2017 tidak lagi memperoleh penghargaan dari KPK sebagai UPG terbaik dalam melaporkan gratifikasi, dan menurut data bahwa laporan gratifikasi tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2015 jumlah laporan gratifikasi sebanyak 51 laporan dengan nilai total Rp27.060.000,00 terdiri dari Rp11.990.000,00 berbentuk barang dan Rp15.070.000,00 berbentuk uang. Tahun 2016 jumlah laporan gratifikasi turun menjadi 37 laporan dengan nilai Rp16.685.000,00 terdiri dari Rp11.675.000,00 berbentuk barang dan Rp5.010.000,00 berbentuk uang. Tahun 2017 jumlah laporan gratifikasi turun lagi menjadi 30 laporan, tetapi dengan nilai uang meningkat yakni Rp249.935.650,00 yang terdiri dari Rp37.058.650,00 berupa barang, dan Rp212.877.000,00 berupa uang (Rp.189.077.000,- merupakan laporan pernikahan).

Berdasarkan latar belakang di atas, serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 072/P/2012 tentang Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi tugas pada huruf j yakni melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian gratifikasi

bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kemendikbud memandang perlu melakukan monitoring dan evaluasi tentang kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) telah menetapkan 5 (lima) langkah untuk penguatan pengawasan berbobot 15% yang terdiri dari : 1) Pengendalian Gratifikasi (3%); 2) Penerapan SPIP (3%); 3) Pengaduan Masyarakat/Dumas (3%); 4) *Wistle Blowing System* (WBS) (3%); 5) Penanganan Benturan Kepentingan (3%)
Target yang ingin dicapai adalah : 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara; 2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara; 3) Meningkatnya status opini BPK; 4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.



Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10260/FF.1.3/WS/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Program Pengendalian Gratifikasi yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya Pemandikbud itu diharapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah juga membentuk Satgas Pengendalian Gratifikasi, memerintahkan seluruh pegawai untuk menolak gratifikasi, apabila tidak dapat menolak agar melaporkannya kepada Satgas Pengendalian Gratifikasi di instansi masing-masing, dan selanjutnya melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung atau dapat melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua Tim Pembangunan ZI-WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan bahwa Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu: Transparansi; Akuntabilitas; Kepastian

Hukum; Kemanfaatan; Kepentingan Umum; Independensi; dan Perlindungan bagi Pelapor. LPMP NTB perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi. Satgas Pengendalian Gratifikasi ini akan ikut serta mengawal keberhasilan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Pengawasan diperkuat dengan memperbanyak tunas-tunas integritas yang anti korupsi khususnya gratifikasi agar bisa dikendalikan. Secara sistem pengawasan diperkuat melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan efektif dan efisien. Selain itu juga dibangun budaya agar pegawai dapat menyampaikan informasi tentang adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan antara prosedur dan implementasi. Peran Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi sangat strategis dalam rangka mempercepat Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme “, tutup

Made.

Oleh : IMMA 2020



LPMP NTB LAKSANAKAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI-WBK



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) pada tanggal 18 Pebruari 2020 melaksanakan “Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)”. Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju WBK dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Senggigi Kabupaten Lombok Barat, yang dilakukan oleh Kepala LPMP NTB dan disaksikan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB, Anjak Tipikor Bareskrim Polri Jakarta dan Inspektur II Itjen Kemendikbud RI. Hadir pula Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD Dikmas) NTB, Kepala Kantor Bahasa NTB, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan

LPMP NTB, Media Massa, serta peserta *In House Training (IHT)* lainnya.

Selain “Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” juga dilakukan Penandatanganan “Maklumat Keterbukaan Informasi Publik” oleh Kepala LPMP NTB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh Pegawai LPMP NTB baik ASN maupun PPNPN menandatangani “Komitmen Bersama” terkait Pembangunan ZI-WBK. Penandatanganan Komitmen Bersama itu sangat penting, untuk menunjukkan bahwa seluruh pegawai LPMP NTB terlibat dalam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Diakhir Pencanangan juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Penetapan

Kinerja. Semua kegiatan yang dilakukan ini dalam rangka merubah pola pikir (*mind set*) pegawai agar mau melakukan reformasi, minimal mereformasi diri sendiri, sebelum mereformasi orang lain. Perubahan *mind set* itu sangat penting dan paling utama dalam Reformasi Birokrasi. Sehebat apapun sarana prasarana disiapkan, tetapi tanpa didukung oleh perubahan *mind set* SDM yang paripurna, tidak akan mungkin WBK terwujud.

Ada 5 (lima) kata kunci Satuan Kerja (Satker) agar bisa meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu:

Kepemimpinan merupakan faktor penentu terpenting dalam strategi menuju WBK. Pemimpin harus memahami 6 (enam) area perubahan WBK, yang dikenal dengan komponen pengungkit.

Komponen pengungkit adalah kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilakukan satuan kerja untuk membangun WBK. Ada 6 (enam) kegiatan yang dapat dilakukan yaitu Manajemen Perubahan,

1. Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. Keenam pengungkit itu masing-masing dipimpin oleh Tim, dan masing-masing Tim harus bisa berkolaborasi. Mustahil Predikat WBK diraih tanpa Kolaborasi. Pemimpin akan menggerakkan seluruh pegawai menuju perubahan yang diperlukan untuk WBK
2. Manajemen dan administrasi yang tertib dan rapi sangat penting bagi satuan kerja untuk membuktikan, bahwa prinsip tatakelola yang baik sebagai potensi WBK sudah diterapkan.
3. Sumber daya organisasi harus dioptimalkan secara efisien. Sumber daya terpenting adalah SDM yang menetapkan Budaya Kinerja. Dengan demikian maka SDM akan memiliki etos kerja tinggi dan produktif menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Budaya kinerja menjadi isu strategis terpenting karena menekankan pentingnya sinkronisasi antara indikator kinerja Renstra Kemendikbud, Renstra Unit Utama, dan Renstra UPT. Budaya Kinerja juga menyatakan pentingnya hubungan yang jelas antara indikator kinerja organisasi dengan indikator kinerja individu pegawai. Hasil kinerja tidak hanya *output* tetapi juga *outcome* demi kemaslahatan publik.
5. Pelayanan publik yang inovatif sangat menjadi penentu bagi satuan kerja untuk disematkan menjadi WBK. Satuan



kerja harus menjamin bahwa pelayanan publik harus bermutu dan disajikan secara transparan, cepat, dan adil/tidak diskriminatif.

Sebelum “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi”, Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, M.Pd. menyampaikan maksud dan tujuan dari “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)” yaitu Meningkatkan Komitmen Bersama, Sinergitas, Kekompakan, dan Kerjasama seluruh Pegawai baik ASN maupun PPNPN dilingkungan LPMP NTB dalam Pembangunan ZI-WBK. “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)” dilingkungan LPMP NTB disamping disaksikan oleh pihak Internal juga disaksikan oleh Pihak Eksternal, dan baru tahun 2020 “Pencanangan” ini disaksikan oleh

Pihak Eksternal diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia dan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan salah satu langkah maju yang dilakukan oleh LPMP NTB.

Menurut Penanggungjawab *In House Training* (IHT) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)” dilingkungan LPMP NTB Tahun 2020 ini merupakan tonggak sejarah baru bagi LPMP NTB, pertama didalam Piagam Pencanangan tersebut disaksikan dan ditandatangani juga oleh pihak eksternal diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kedua dilakukan juga Penandatanganan “Maklumat Keterbukaan Informasi Publik” yang merupakan internalisasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “

Mari kita keluar dari Kepompong Masa lalu menuju ke arah perubahan yang lebih baik, berintegritas, dan Ciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”, tutup Made.

Oleh : IMMA 2020



UNIT LAYANAN TERPADU



LPMP NTB LAKUKAN PENDAMPINGAN PADA 200 SEKOLAH MODEL

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semakin eksis membangun Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipropinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi: 1) Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 3) Supervisi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP); 4) Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

terhadap Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan; 5) Pelaksanaan Kerjasama Dibidang Penjaminan Mutu Pendidikan; 6) Pelaksanaan Urusan Administrasi LPMP.

Salah satu fungsi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) adalah Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan. Pendampingan sekolah yang akan difasilitasi oleh LPMP NTB Tahun 2020 adalah sebanyak 200 (dua ratus) Sekolah Model mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK diseluruh kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat. Program/kegiatan yang akan dilakukan oleh LPMP NTB dalam fasilitasi sekolah tahun 2020 adalah sebagai berikut : 1) Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); 2) Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal; 3) Penyusunan Program dan Bimtek Pendampingan SPMI; 4) Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP; 5) Asistensi dan MOU Bantuan Pemerintah; 6) Penyaluran Bantuan

Pemerintah; 7) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMI di Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP. Pendampingan sekolah yang difasilitasi oleh LPMP NTB adalah terkait dengan Sekolah Model. Sekolah model adalah sekolah yang diusulkan oleh dinas pendidikan propinsi untuk jenjang Pendidikan menengah dan kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan dasar dan ditetapkan oleh LPMP NTB untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan disatuan pendidikan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah yang akan ditetapkan sebagai Sekolah Model harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya : Akreditasi B, belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), letaknya strategis, dan yang terpenting adalah sekolah mempunyai komitmen yang tinggi dalam penjaminan mutu pendidikan khususnya dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk tahun 2020 Provinsi NTB mempunyai 200 (dua ratus) sekolah model, satu sekolah model mempunyai 5 (lima) sekolah imbas. Jumlah sekolah imbas NTB kurang lebih 1.000 (seribu)

n

sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sekolah model yang ada akan dipergunakan sebagai acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sebagai pusat sumber belajar, sebagai Laboratorium serta sebagai narasumber.

Menurut salah satu Penanggungjawab Kegiatan Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Fasilitasi Sekolah yang dilakukan oleh LPMP NTB bertujuan agar Sekolah Model melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan sehingga sekolah berbudaya mutu dan pada akhirnya akan mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) bahkan melampaui SNP. Sekolah Model yang telah 3 (tiga) tahun mendapatkan bantuan pemerintah (bantah) dari LPMP NTB tidak akan diberikan lagi, dan diharapkan bisa melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Bab XV tentang Penjaminan Mutu, pada Pasal 13 menjelaskan:

1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu

pendidikan

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)



(3) Penjaminan Mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu pendidikan yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) Bab VI pasal 13 menyebutkan:

(1) Satuan Pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu

(2) Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya dilakukan pengurangan dan/atau penghentian pemberian bantuan peningkatan mutu oleh Pemerintah.

“Kami berharap sekolah yang tidak mendapat bantuan pemerintah (bantah) lagi masih tetap eksis melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)”, pungkask Made.

Oleh : IMMA 2020



FOTO BERSAMA :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa H.Syahriil, S.Pd (tiga dari kanan), dan Widyaiswara LPMP NTB Rustam Effendi, S.Kom.,MT (dua dari kiri). Kegiatan Pendampingan Pemetaan Mutu oleh LPMP NTB pada Induk Kluster Sekolah Model SPMI



LPMP NTB Gelar Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Rakor PPDB) Tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 6-8 Maret 2020 bertempat di LPMP NTB. Rakor PPDB tahun 2020 merupakan salah satu kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan oleh LPMP NTB. Ada beberapa alasan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat perlu, penting, dan strategis dilaksanakan karena : 1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum dapat dilaksanakan secara optimal disemua daerah; 2) Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.

Adapun Peserta Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Rakor PPDB) berjumlah 40 (empat puluh) orang berasal dari: Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se NTB, dan LPMP NTB. Maksud dan tujuan dari Rakor PPDB ini adalah : 1) Tersosialisasinya Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Tersosialisasinya Kebijakan Pemerintah Daerah NTB dalam PPDB; 3) Tersosialisasinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; 4) Tersosialisasinya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2020/2021; 5) Tersusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Daerah NTB; 6) Tersusunnya Dokumen Penetapan Wilayah Zonasi Daerah disetiap Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

Narasumber yang terlibat dalam Rakor PPDB ini adalah Dr. Chatarina Muliana, SH.,SE.,MH Staff Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dr. H. Aidy Furkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui 4 (empat) Jalur sebagai berikut: Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi. Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah, Jalur Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung Sekolah, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah, dan jika masih ada sisa kuota dari pelaksanaan jalur Zonasi/Jalur Afirmasi/Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Pemerintah Daerah dapat membuka Jalur Prestasi. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.

Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka oleh Kepala

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. Pada saat memberikan pengarahan beliau menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga bertujuan untuk meningkatkan Sinergitas dan menguatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini terkait dengan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Untuk mengawal Penjaminan Mutu Pendidikan di setiap kabupaten/kota dan meningkatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS), LPMP NTB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, masing-masing kabupaten/kota yang akan dikoordinir oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB. Ada beberapa Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar antara lain : USBN, UN, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan prinsip : nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau



agama tertentu. Melalui Rakor PPDB ini kami berharap “ Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di NTB dapat dilaksanakan secara optimal disemua daerah kabupaten/kota, serta dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat ”, tutup Mustari.

Penanggungjawab Kegiatan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., menyatakan Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah. Dalam Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, pasal 36 ayat (4) disebutkan bahwa Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan P P D B m e l a l u i l a m a n <http://ult.kemdikbud.go.id> Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) tahun 2019 pada saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan PPDB melakukan Audensi dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB, untuk mendapatkan data dan informasi laporan masyarakat terkait Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Satuan Pendidikan.

Oleh : IMMA 2020





KOORDINASI & KONSOLIDASI Suatu Keharusan Dalam LPMP

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Maret 2020 menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Kabupaten Lombok Tengah bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Rapat diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta berasal dari Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Bappeda, MKKS, DPRD Komisi IV, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan PGRI, dalam rangka mendekatkan Pelayanan Pemerintah Pusat dalam hal ini LPMP NTB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Bapak H. Lalu Pathul Bahri, SIP., dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi dan attensi kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini dalam rangka

Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di wilayah Lombok Tengah.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Bapak Supli, SH., yang hadir dalam kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada LPMP NTB dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh LPMP NTB bermanfaat Rapat Koordinasi dan K untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Beliau juga berharap permasalahan-permasalahan Pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah bisa cepat diselesaikan secara terukur dan bertahap, dan step-step penyelesaian persoalan perlu ada bantuan dari LPMP NTB. Kami menyarankan untuk Peningkatan Guru-guru yang diutamakan adalah Guru Tidak tetap (GTT). Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang hadir mengatakan " mutu pendidikan tidak bisa tercapai jika kesejahteraan guru kurang diperhatikan". Saat ini GTT di Kabupaten Lombok Tengah hanya menerima insentif Rp.100.000 perbulan dan perlu dinaikkan lagi, dan orientasi pembangunan harus dititikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

bukan pada pembangunan fisik saja. Peserta dari Bappeda Kabupaten Lombok Tengah menampung masukan-masukan, agar insentif GTT tahun 2021 dinaikkan menjadi Rp 1.000.000/bulan. Begitu juga dengan usulan pengadaan Kendaraan Dinas bagi Pengawas Sekolah yang saat ini rata-rata Kendaraan Dinas usianya lebih dari 5 (lima) tahun. Adapun Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Kepala LPMP NTB, dan Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah H. Sumum, S.Pd.,M.Pd., menyampaikan rasa bangga atas karena kegiatan ini termasuk kegiatan Lintas Sektoral dimana dihadiri oleh berbagai *stakeholder* yang peduli dengan Pendidikan yaitu DPRD Komisi IV, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Kepala Sekolah, Guru termasuk juga dari PGRI Kabupaten Lombok Tengah. Beliau juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kebijakan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah antara lain Literasi, Numerasi, dan salah satu Strategi yang dilakukan adalah memberikan layanan semua anak didik bangsa

termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu Pengembangan Pendidikan Inklusi. Narasumber dari Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB Drs. Ma Min Shen, M.Pd. menyampaikan paparan tentang Profil Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah.

H. Lalu Dipta Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Tengah, mengatakan Guru-guru yang ada di Kabupaten Lombok Tengah lebih banyak dari dari Guru Honorer. Kami berharap dalam rekrutmen pengangkatan Guru, agar ada perbedaan perhatian antara guru honorer dengan yang umum. Rekrutmen honorer lebih dikhususkan/diperhatikan karena rata-rata pengabdian guru honorer cukup lama. Pada intinya kesejahteraan guru honorer perlu lebih ditingkatkan. Zaenudin salah satu Kepala Sekolah peserta Rapat Koordinasi dan Konsolidasi memberikan masukan khusus tentang Website LPMP NTB. Beliau berharap konten dan wajah Website LPMP NTB perlu dilakukan penambahan, perbaikan atau pembenahan. Konten-konten yang dimunculkan adalah konten-konten terki

ni (kekinian) menyangkut Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbaru, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar, Kebijakan Merdeka Belajar, HOTS, Widyaprada, NUPTK, Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan lain sebagainya. Data-data dan informasi diupdate setiap saat, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat selalu terupdate (kekinian).

Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D., memaparkan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran 2020/2021. Kebijakan Merdeka Belajar sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 yaitu Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021. Ada beberapa poin penting dalam Penentuan

Kelulusan Peserta Didik yaitu : kelulusan peserta didik ditentukan oleh ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, Bahan ujian sekolah dibuat oleh masing-masing satuan Pendidikan (seperti test tertulis, fortfolio, penugasan dan/atau bentuk lain), Satuan Pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian bisa mengambil dari soal-soal yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Disamping memaparkan Program dan Kegiatan LPMP NTB tahun 2020 juga disampaikan Capain Kinerja LPMP NTB tahun 2019. Ada beberapa kendala atau permasalahan ditahun 2019 antara lain Aplikasi Pengisian PMP, dan Aplikasi Supervisi Mutu Pendidikan. Permasalahan dan kendala yang muncul dalam penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan mutu Pendidikan perlu diselesaikan bersama-sama untuk itu “ Koordinasi dan Konsolidasi Suatu Kecharusan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan”, ungkapny.

Oleh : IMMA 2020



GALLERY ACARA

WORKSHOP Penyusunan Profil Pendidikan NTB 2020 dalam rangka melahirkan sebuah karya sumber informasi.



MERDEKA BELAJAR DALAM PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK

Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0053/P/BSNP/I/2020 Tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, dimana peraturan ini berlaku mulai tanggal 14 Januari 2020. Dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN Bab XI tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dijelaskan bahwa : 1) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan UN dilakukan oleh Panitia Pusat, Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, serta Panitia di Luar Negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan menggunakan instrument yang telah dikembangkan berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN; 2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi menjadi bahan pertimbangan perbaikan penyelenggaraan dan pelaksanaan UN pada masa mendatang

Sesuai dengan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0053/P/BSNP/I/2020 Tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat selama 2 (dua) hari mulai tanggal 16-17 Maret 2020 melakukan Pemantauan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diseluruh kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan UN untuk Jenjang SMK/MK dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 16-19 Maret 2020.

Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah ujian nasional yang menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Pemantauan UN dilakukan oleh Tim Pemantau UN dari unsur Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staff potensial dilingkungan LPMP NTB berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Fahrizal, S.Pd.,M.Pd. mengatakan untuk Kabupaten Sumbawa Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terdaftar Ujian Nasional tahun ajaran 2019/2020 sejumlah 1.928 orang, dengan rincian 1.163 jenis kelamin laki-laki dan 765 jenis kelamin perempuan, berasal dari 10 (sepuluh) SMK Negeri dan 6 (enam) SMK Swasta. Kami berharap semoga UNBK tahun pelajaran 2019/2020 berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Hari pertama tanggal 16 Maret 2020 Mata Pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, hari kedua tanggal 17 Maret 2020 Mata Pelajaran Matematika, hari ketiga tanggal 18 Maret 2020 Mata Pelajaran Bahasa Inggris, dan hari keempat tanggal 19 Maret 2020 Teori Kejuruan. Sesi pertama UN dimulai pukul 07.30-09.30, Sesi kedua dimulai pukul 10.30-12.30, dan Sesi ketiga dimulai pukul 14.00-16.00 Wita. Tim *Help desk* UNBK dipusatkan di SMKN 1 Sumbawa. Adapun tugas Tim *Help desk* antara lain : 1) Memberikan informasi dan penjelasan terkait pertanyaan dan

pengaduan yang diajukan oleh Pengawas, Proktor, dan Petugas ujian; 2) Menerima, merekap, dan memberikan solusi terhadap permasalahan, pertanyaan, dan/atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan ujian sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Pelaksana UNBK Tingkat Pusat; 3) Berkoordinasi dengan Tim *help desk* ditingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat sesuai dengan kewenangannya.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590). Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2020 itu dijelaskan beberapa hal terkait Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik yaitu : 1) Kelulusan Peserta Didik ditentukan oleh melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru; 2) Bahan ujian untuk kelulusan peserta didik (seperti test tertulis, portfolio, penugasan, dan/atau kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing Satuan Pendidikan; 3) Satuan Pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah

dapat menggunakan bahan penilaian (test tulis, tugas, dan/atau bentuk lain) yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); 4) Dinas tidak dapat memaksa Satuan Pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik, Kepala SMKN 3 Sumbawa Nasrullah Darwis, S.Pd., M.Pd. sangat setuju dengan kebijakan itu karena sekolah diberikan kebebasan

untuk menentukan kelulusan peserta didik dan soal dibuat oleh Satuan Pendidikan/sekolah/guru. Senada dengan Kepala SMK Mercury Sumbawa, Khairiyah, SE kami juga setuju dengan Kebijakan Merdeka Belajar dimana Satuan Pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kelulusan peserta didik dan soal dibuat oleh guru atau bisa diambil dari Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Salah satu siswa SMKN 1 Sumbawa Besar sangat setuju UN dihapus karena soal-soal ujian akan dibuat oleh guru sendiri yang mengajar kita sehingga soal-soal yang akan keluar saat ujian bisa diketahui. Berbeda

dengan Kepala SMKN 1 Sumbawa Ir Hasiah, S.Pd, "Saya secara pribadi kurang setuju dengan Kebijakan Merdeka Belajar yang akan menghapus Ujian Nasional. (UN), karena dengan UN optimisme belajar siswa menjadi lebih meningkat, dengan UN *Grade* sekolah bisa meningkat, UN dapat mengukur kemampuan siswa dan kemampuan guru".

Menurut salah seorang Tim Pemantauan Ujian Nasional, Drs. I Made Murtu Astawa, M.Pd., Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mengatakan Ujian Nasional tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa berjalan dengan baik dan lancar berkat kerjasama semua pihak, Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Cabang Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa, dan semua *stakeholder* yang peduli dengan pendidikan. Dengan dikeluarkannya Kebijakan Merdeka Belajar melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan mulai tahun 2021 Kelulusan Peserta Didik ditentukan oleh Satuan



4

PROGRAM POKOK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MERDEKA BELAJAR

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Uji Kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif.

Ujian Nasional (UN)
Tahun 2020 Menjadi UN Terahir, selanjutnya akan diubah menjadi asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Kemendikbud akan menyederhanakan RPP Dengan memangkas beberapa komponen.

Peraturan PPDB Zonasi
Sistem zonasi digunakan dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi akses dan kualitas di berbagai daerah

Penilaian berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh guru dan bahan ujian untuk kelulusan peserta didik (seperti test tertulis, portfolio, penugasan, dan/atau kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing Satuan Pendidikan. Ini artinya Satuan Pendidikan diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam penentuan kelulusan peserta didiknya. " Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik ", pungkasnya

Oleh : IMMA 2020

COVID-19 MONEV BDR MELALUI TELEKONFERENSI



Pandemi corona virus disease tahun 2019 (Covid-19) akhir-akhir ini membuat banyak masyarakat merasa gelisah memikirkan kesehatan dan kondisi tubuhnya serta kekhawatiran akan terjangkit virus korona. Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan imbauan agar warga Indonesia waspada terhadap penularan penyakit akibat virus corona berat ini.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Mohamad Mustari, Ph.D menindaklanjuti imbauan dari pemerintah pusat dengan mengadakan kegiatan Rapat Sosialisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan monitoring dan evaluasi Bekerja Dari Rumah (BDR) melalui telekonferensi. Beliau mengingatkan, dengan kondisi semakin meluasnya

wabah Covid-19 di NTB agar : stay at home, menjaga kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus corona, menjaga kebersihan lingkungan dan tetap mencuci tangan” saat mengawali arahan rapat sosialisasi jarak jauh melalui aplikasi zoom dengan seluruh Aparatur Sipil Negara LPMP NTB.

Beliau berharap agar wabah virus ini segera berakhir dan mengimbau kepada seluruh ASN LPMP NTB untuk menjaga kesehatan dengan tetap olah raga dan pola makan yang teratur. Diakhir arahnya Beliau menyampaikan, “ Walau di rumah agar semua ASN tetap bekerja yang dibuktikan dengan mengisi

Log Harian, mengisi absensi harian, dan memantau e-office”.

Sebelum kegiatan dimulai Kepala Sub Bagian Umum Dra. Sri Sukriyani selaku moderator dalam kegiatan ini berdi-

alog langsung dengan ASN LPMP NTB untuk memastikan semua dalam kondisi sehat termasuk anggota keluarga di rumah.

Kegiatan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020 pukul 10 s.d 12.30 Wita mendiskusikan banyak hal diantaranya mengadakan gerakan meminimalisasi penyebaran Virus corona dengan membagikan masker, laporan Satuan Pengawasan Internal, ZI-WBK, Tunas Integritas, dan pemberlakuan BDR untuk NTB.

Rapat jarak jauh ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sebagai langkah bekerja dari rumah yang didorong oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. (PIK)



LPMP NTB LAKSANAKAN BIMTEK PENGELOLAAN BMN

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari **asset** Pemerintah, sedangkan asset adalah sumber daya ekonomi yang di kuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya. Pengelolaan barang milik negara harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas Lembaga.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan BMN dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Maret 2020 di LPMP Nusa Tenggara Barat yang diikuti oleh 27 orang peserta dengan rincian : BPPAUD dan DIKMAS NTB 2 orang, Kantor Bahasa NTB 2 orang, dan LPMP NTB 23 orang. Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan ini dari KPKNL Mataram Dhita Jati Kusuma, ST dan Heryan Wibowo, Sedangkan dari Biro Keuangan

dan BMN hadir Bapak Agus Triono dan Engkus Kusnandar.



Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan agar pengelola BMN dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang penatausahaan BMN yang meliputi:

- 1) Penatausahaan BMN (PMK 181/PMK.06/2016).
- 2) Implementasi perencanaan kebutuhan BMN.
- 3) Strategi pengamanan dan penertiban BMN di

lingkungan emendikbud

- 4) Percepatan penyelesaian masalah BMN di lingkungan Kemendikbud.

Dengan penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib, akuntabel, dan akurat akan menjadi modal yang sangat berharga bagi perbaikan dalam merencanakan kebutuhan BMN. (PIK)



MAKSIMALKAN LAYANAN, ULT LPMP NTB HADIR LEBIH DEKAT DENGAN SATUAN PENDIDIKAN

Salah satu agenda reformasi pelayanan yang dicanangkan pemerintah adalah penerapan pelayanan satu atap atau Unit Layanan Terpadu. Melalui Unit Layanan Terpadu diharapkan peningkatan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Untuk memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, mengurangi biaya sekaligus memberikan informasi yang tepat bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada satuan pendidikan, Unit Layanan Terpadu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (ULT LPMP NTB) terus berupaya memberikan layanan maksimal yaitu layanan yang cepat, tepat,

mudah, aman, berkeadilan dan akuntabel dengan hadir lebih dekat untuk memberikan layanan konsultasi pendidikan kepada (PTK) pada satuan pendidikan. Dua lokasi yang menjadi target pada bulan Pebruari 2020 adalah kecamatan Narmada dan Lembar. Kegiatan ULT “Keliling” dilaksanakan dari tanggal 10 s.d 11 Pebruari 2020.

Selama kegiatan ULT “keliling” ada beberapa permintaan informasi dan aduan yang disampaikan oleh PTK diantaranya adalah Dapodik, NUPTK, Sertifikasi Guru, DUPAK, Rumah Belajar, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dengan 120 aduan dan permintaan informasi selama 2 hari.

Selain memberikan layanan informasi kepada PTK, ULT LPMP menyediakan “Pojok Literasi” bagi

siswa-siswi untuk dapat mengenalkan dan meningkatkan kecintaan anak pada buku serta gemar membaca.

Ada Pun Tim ULT “Keliling” berjumlah 8 orang masing-masing dengan bidang yang berbeda untuk memberikan layanan informasi dan menerima pengaduan dari PTK.

Kepala Sub Bagian Umum LPMP NTB Hj. Sri Sukriyani turut hadir dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan, “Kehadiran ULT Keliling untuk mempermudah akses informasi yang diperlukan oleh Bapak/Ibu Guru di Sekolah” saat membuka layanan informasi di SDN 1 Lembar selatan, SDN 1 Jembatan Gantung, SDN 1 Kuta Batu, dan SDN 1 Dasan Tereng .(PIK)





MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN, LPMP NTB LAKSANAKAN MOU DENGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Menyadari hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani pendidikan dan berusaha terus untuk peningkatan mutu pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan kearah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) berkomitmen untuk melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada di NTB

dengan memberikan beberapa program Fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan. Hal tersebut dituangkan dalam MoU dengan Satuan Pendidikan dan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah

Guru Mata Pelajaran. Dengan tujuan agar

sekolah-sekolah yang dibina harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan mampu bersaing dengan sekolah lain

baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Kegiatan penandatanganan MoU Fasilitasi Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 dihadiri 39 peserta dari unsur Kepala Sekolah dan Ketua KKG/MGMP, serta semua Widyaiswara dan Pejabat Struktural LPMP NTB. Kegiatan dibuka oleh Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. Beliau menyampaikan harapan, "program Fasilitasi Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan, dapat menjadikan satuan pendidikan lebih berprestasi, Serta mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Widyaiswara LPMP NTB".

Ada 2 kerjasama yang tertuang dalam MoU tersebut, yaitu Fasilitasi bimbingan teknis dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pendampingan Satuan Pendidikan dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan. (PIK)

PENANDATANGANAN
MOU

**FASILITASI BIMTEK &
PENDAMPINGAN PENINGKATAN
MUTU SATUAN PENDIDIKAN
YANG DI DAMPINGI OLEH
WIDYAISWARA
LPMP NTB**



Pandemi Covid-19

Pembelajaran Di Sekolah Terhenti ?



Pandemi covid-19 telah menciptakan kebutuhan dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial (social distancing), karantina, dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Proses kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik pun sementara waktu dilakukan di rumah guna meminimalisir kontak fisik langsung secara massal.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) terus berupaya menggerakkan sumber daya pendidikan di NTB untuk tetap menjalankan proses pembelajaran di kelas yang salah satunya dengan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar Dari Rumah (BDR) jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dengan pola 32 jam pelajaran.

Kegiatan Bimtek dilaksanakan secara bertahap, jenjang SD dimulai pada tanggal 27 April s.d 6 Mei 2020, jenjang SMP

dan SMA pada tanggal 11 s.d 18 Mei 2020, dan jenjang SMK pada tanggal 13 s.d 19 Mei 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 240 orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota se-provinsi NTB yang terbagi dalam 5 kelas dengan unsur Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas. Narasumber dari kegiatan ini adalah Widyaiswara, Staf, dan Pejabat Struktural LPMP NTB.

Kepala LPMP NTB Mohamad Mustari, Ph.D menyampaikan, "Masa pandemi covid-19, pembelajaran jarak jauh merupakan sebuah solusi untuk dapat memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa disaat pandemi, Bapak/Ibu guru jangan terbebani dengan tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum baik untuk kenaikan kelas maupun kelulusan siswa", Saat membuka kegiatan Bimtek melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dr. Wirman Kasmayadi selaku narasumber pada kegiatan ini juga menyampaikan melalui aplikasi Zoom Meeting, "Proses

pembelajaran bermakna diartikan sebagai Proses mengaitkan informasi baru pada konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang; Proses belajar bersifat individual dan kontekstual; Meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, serta sains; Memanfaatkan TIK; Mendorong empati, integritas, dan tanggungjawab terhadap diri, keluarga, dan lingkungan".

Dari hasil diskusi melalui aplikasi Zoom beberapa daerah masih terkendala dengan ketersediaan jaringan internet untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sehingga di masa pandemi ini daerah tersebut menerapkan semi dalam jaringan (daring) sebagai solusinya.

Tujuan dari Bimtek ini adalah Memutus rantai penyebaran dan penularan covid-19 dengan Belajar Dari Rumah (BDR); Memenuhi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat covid-19; Memenuhi dukungan psikologi dan sosial bagi pengajar, siswa, dan



orang tua.

Adapun prinsip pelaksanaan PJJ saat BDR adalah Mengedepankan keselamatan dan kesehatan lahir batin seluruh warga sekolah; BDR memberikan

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani pencapaian ketuntasan kurikulum; Mengedepankan pola Interaksi dan atau komunikasi yang positif antara pendidik dengan

siswa dan orang tua; Materi pada BDR selain yang ada dalam kurikulum dapat berupa pendidikan kecakapan hidup tentang Covid-19, pendidikan karakter sesuai dengan jenjang pendidikan; dan Aktivitas dan penugasan selama BDR tidak menjadi beban baru sehingga dapat bervariasi antar sekolah, antar daerah d e n g a n mempertimbangkan kesenjangan akses dalam pelaksanaan.

Dengan melihat kondisi daerah disaat pandemi covid-19 kreativitas guru sangat diperlukan guna memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tanpa harus melihat ketuntasan kurikulum.(PIK)





PUSAT SANGGAR RUMAH BELAJAR

“Wahana Kegiatan Inovatif dan Kolaboratif Dalam Mendukung Pendidikan Bermutu”

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bermutu berbasis teknologi informasi dan komunikasi telah membuat portal pembelajaran, yaitu “Rumah Belajar”. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Hal ini didukung dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Rumah Belajar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kepala LPMP NTB bersama dengan duta rumah belajar dan fungsional

Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) LPMP NTB menginisiasi dibentuknya Pusat Sanggar Rumah Belajar (PSRB). PSRB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala LPMP NTB Nomor :476/C7.47/KS/2020, tentang Pembentukan Pusat dan Tim Sanggar Rumah Belajar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembina PSRB adalah Kepala LPMP NTB dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, sedangkan tim berasal dari unsur PTP LPMP NTB dan Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (BPTP) Dinas Dikbud Provinsi NTB, Duta Rumah Belajar 2017-2019, dan Sahabat Rumah Belajar. Pembina PSRB sekaligus Kepala LPMP NTB, Mohammad Mustari, P.h.D. berharap PSRB dapat di jadikan wahana untuk pengoptimalan

pemanfaatan Rumah Belajar bagi Pendidikan Siswa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ketua PSRB, Hastotyas Suryono, S.Pd. (Duta Rumah Belajar NTB Tahun 2019) menambahkan bahwa kegiatan PSRB selain untuk sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan rumah belajar juga akan melakukan kegiatan bimbingan teknis terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran kolaborasi antara duta rumah belajar, sahabat rumah belajar, dan PTP. Selama pandemi covid-19, PSRB mengambil bagian dalam melaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara daring (*online*), antara lain 1) **Belajar Daring jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK**

Program belajar daring ini menjadi salah satu alternative belajar di rumah dengan menyenangkan karena dipandu oleh guru kelas atau pun guru mata pelajaran

dengan metode yang sangat menarik. Dalam belajar daring ini selain paparan materi, Tanya jawab, juga tidak jarang diberikan kuis secara daring oleh pemateri. Program belajar daring dengan menggunakan Zoom Meeting ini dilaksanakan selama 2 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Selasa dan Kamis ini dengan durasi masing-masing 90 menit untuk masing-masing jenjang. Sebanyak 6 edisi telah dilaksanakan selama bulan April tahun 2020, yaitu pada tanggal 3, 7, 9, 14, 16, dan 21.

2) Bimbingan Teknis PembaTIK (Pembelajaran berbasis TIK)

Bimbingan Teknis PembaTIK (Pembelajaran berbasis TIK) merupakan salah satu upaya dari PSRB untuk memberikan pembekalan kepada tenaga pendidik yang mengikuti program pembelajaran berbasis TIK (PembaTIK) level 1 yang diselenggarakan oleh Kem dikbud. Materi yang disajikan oleh Duta Rumah Belajar diantaranya internet sehat, internet untuk pembelajaran, dan pembelajaran berbasis rumah belajar. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 4 gelombang ini (15 April, 17 April, 20 April, dan 22 April 2020) ini di

ikuti oleh sekitar 300 peserta. Dukungan penuh datang dari Kepala LPMP NTB dan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang selalu memberikan sambutan dan membuka kegiatan secara resmi pada setiap gelombang.

3) Cepat Tepat Daring (Online) Jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK

Memeriahkan hari Pendidikan Nasional dan hari Kebangkitan Nasional, PSRB menyelenggarakan Cepat Tepat Daring (Online) jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15--18 Mei 2020 mendapat antusias dari siswa sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 923 orang. Materi CTO jenjang SD adalah tematik, jenjang SMP adalah matematika, IPA, dan Bahasa Inggris, sedangkan jenjang SMA/SMK adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. CTO dilaksanakan melalui Room Webex dan aplikasi Quizizz, dipandu oleh duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar. **Technical Meeting** dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020, babak penyisihan tanggal 16

Mei 2020, dan babak final tanggal 18 Mei 2020. Pemenang jenjang SD, yaitu Ni Komang Devi Puspitawati (SDN 1 Ampenan), Abira Mutia Salsabila (SDN 2 Cakranegara), dan Sabilul Aflach Karomy (SD IT Abata Lombok). Pemenang jenjang SMP, yaitu M. Nurcholish (PMI DEA MALELA), Ahmad Suwandi Marzoan (SMPN 1 Selong), dan I Komang Dwi Valentino Wiguna (SDN 1 Ampenan). Pemenang jenjang SMA/SMK yaitu Galuh Sukma Aji (SMAN 1 Sikur), Eva Juniarti (SMAN 2 Sumbawa), dan Faizal Adji (SMKN 1 Sumbawa). Pemenang CTO mendapatkan piala dan piagam penghargaan dari Kepala LPMP NTB untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA/SMK piala dari Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB.

Kepala LPMP NTB sangat mengapresiasi kegiatan PSRB dan kedepannya berharap PSRB lebih maju dengan kegiatan inovatif dan dapat menjadi wahana kolaborasi bagi pendidik dan PTP dalam mendukung pendidikan bermutu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



Flyer Kegiatan Belajar Daring





PSRB - NTB

PUSAT SANGGAR RUMAH BELAJAR

BIMTEK DARING

LPMPTN ISLAM LUBUANG

"Pemanfaatan Google Form Dalam Pengumpulan Data Pendidikan Secara Daring"

Dapatkan Sertifikat 32 JP

KHUSUS Demografi, IDP&S Sekeloa, Guru.

Pendaftaran 06-08 Mei 2020 melalui s.id/daftar-CF2

Bonus Video Tutorial
+ diskusi intensif via WhatsApp

TERBATAS UNTUK 100 PESERTA

Dr. H. Nur Hafid, M.Pd.
Kepala LPMPTN

H. Husein Muzni, S.Pd.
Ketua LPMPTN

JADWAL

VIKON I : 8 MEI 2020

VIKON II : 14 MEI 2020

VIKON III : 19 MEI 2020

Yullyn Samudra, S.Si, M.Pd.
Ketua LPMPTN

@021-7477393 | 081-751-4442 | psrb@psrb-ntb.com | psrb@psrb-ntb.com | psrb-ntb.com

Bincang Pendidikan

Via Link Zoom Meeting

Narasumber

Host/Moderator

Materi Bincang Pendidikan:

- Kebijakan Kementerian dan Birokrasi
- Kebijakan dan implementasi RDR
- Progres pelaksanaan RDR / Tematik dan Pelaksanaan PPSD
- Penyusunan juknis / Pedoman di Tengah Pandemi Covid 19

Pada Bincang Pendidikan:

- Menggunakan Fitur Zoom Meeting
- Penerbitan (Zoom)
- Penerbitan dan penilaian hasil kegiatan
- Penerbitan dan penerbitan Sertifikat
- Aktivitas lainnya:

4. Dr. I Made Rana Ariawan, M.Pd (Ketua LPMPTN)
 5. Ahmad Saifur Rasyid, S.Sos (Pengelola Data Katalisis Supervisi LPMPTN)
 6. Suhanda, S.Pd (Pengelola Data Katalisis Supervisi LPMPTN)

H. Husein Muzni, S.Pd.
Ketua LPMPTN

Dr. Husein Muzni, S.Pd.
Ketua LPMPTN

H. Husein Muzni, S.Pd.
Ketua LPMPTN

@021-7477393 | 081-751-4442 | psrb@psrb-ntb.com | psrb@psrb-ntb.com | psrb-ntb.com

Selamat Kepada :

- 1. Drs. Sakban***
- 2. Drs. I Made Murta Astawa, M. Pd***
- 3. Dra. Hj. Sudiati Prihatiningrum***
- 4. Dra. Hj. Sri Sukriyani***

***TELAH DILANTIK
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pada Tanggal 24 Juli 2020***

